

LAPORAN

INFOGRAFIS HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2020



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2020**

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Laporan Infografis Hasil Pembangunan
Provinsi Papua Tahun 2020



1.1. TINGKAT KEMISKINAN

Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Kemiskinan menurut BPS. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (basic need approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

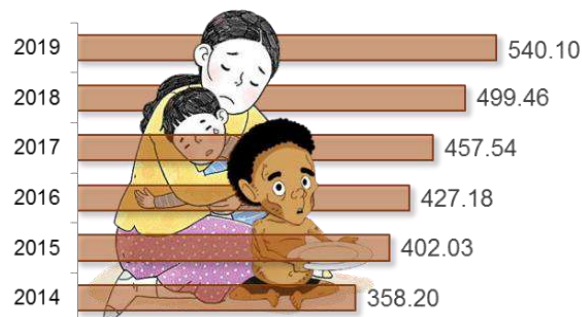
Kesenjangan Terhadap Garis Kemiskinan (P1) dan Ketimpangan Pengeluaran (P2) Semakin Mengecil. Meskipun garis kemiskinan cenderung meningkat, namun berkat adanya berbagai kebijakan *pro poor and equity*, pemerintah Papua berhasil menekan kesenjangan P1 hingga menurun -0,41% per tahun, dan ketimpangan P2 sebesar -0,30% selama tahun 2014-2019.



Kemiskinan di Papua cenderung menurun.

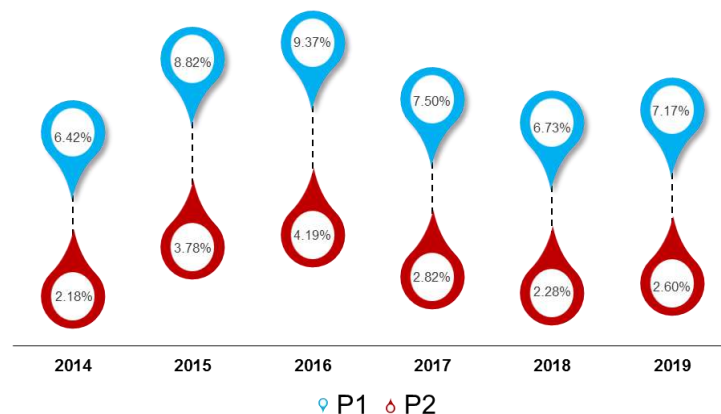
Selama periode 2014-2019 misalkan rata-rata mengalami penurunan -0.05% per tahun, sehingga di tahun 2019 tingkat kemiskinan di Papua tercatat 27,53%, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 540,10 ribu.

Gambar 1.2. Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.3. Indeks Kedalaman (P1) dan Keperahan (P2) Kemiskinan Provinsi Papua 2014-2019

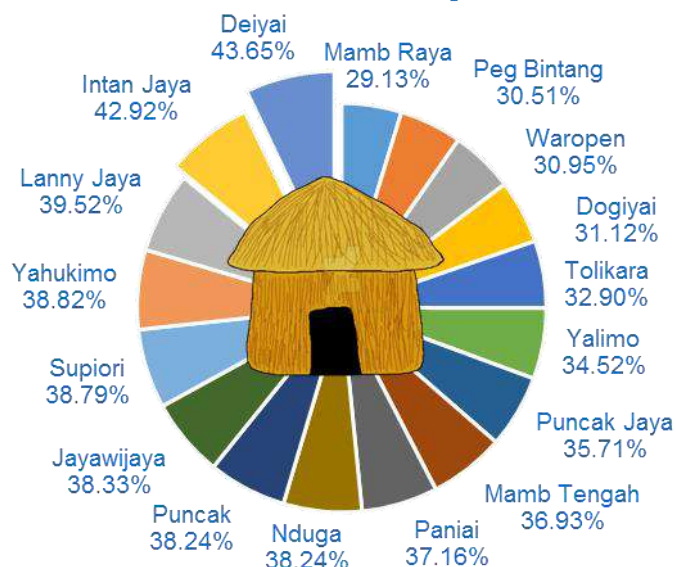


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



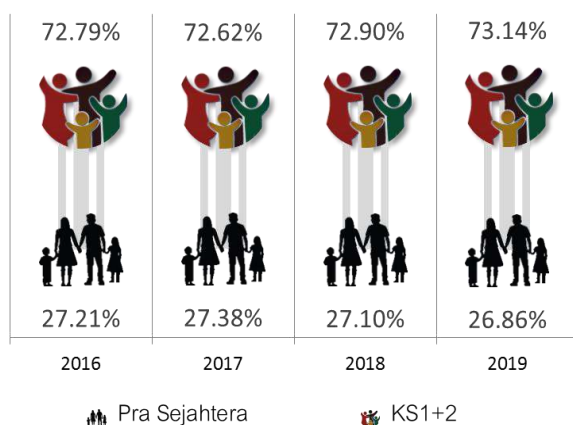
Sebagian besar kantong kemiskinan Papua berada di daerah pegunungan yang sulit akses. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar menjadi penyebab utama kantong kemiskinan paling banyak di daerah-daerah pegunungan, dimana tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 di Kabupaten Deiyai sebesar 43,65% dan Intan Jaya sebesar 42,92%.

Gambar 1.4. Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Di atas Rata-rata Papua Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.5. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Proporsi Keluarga Sejahtera di Provinsi Papua tidak banyak mengalami perubahan. Rata-rata pertambahan proporsi Keluarga Sejahtera (KS1 dan KS2) hanya 0,12% per tahun selama periode 2016-2019. Di tahun 2019 terdapat 73,14% yang termasuk sejahtera, dan 26,86% pra sejahtera dari total 188.492 keluarga.

1.2. KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Akselerasi pembangunan manusia di Papua tergolong cepat. Selama tahun 2014-2019 misalkan rata-rata kenaikan IPM di Papua bisa mencapai 1,40% per tahun, dan telah naik dari kategori IPM Rendah (2014) menjadi IPM Sedang (2019).

Gambar 1.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

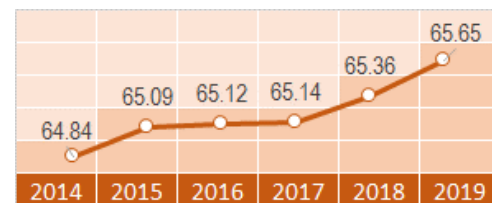


Provinsi Papua mampu mewujudkan *people centered development* dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya komponen-komponen IPM Provinsi Papua sepanjang tahun 2014-2019 sebagai berikut.



Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 65,65 tahun, meningkat 0,81 tahun dibandingkan tahun 2014.

Gambar 1.7. Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

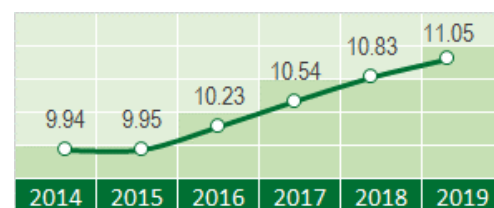


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Penduduk usia 7 tahun memiliki harapan sekolah (HLS) 11,05 tahun, lebih lama 1,11 tahun dibandingkan dengan tahun 2014.

Gambar 1.8. Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas terindikasi rata-rata lama sekolahnya (RLS) 6,65 tahun, lebih lama 0,89 tahun dibandingkan tahun 2014.

Gambar 1.9. Rata-rata Lama Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

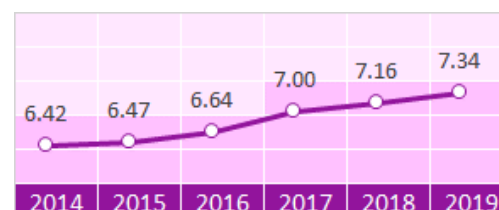


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya meningkat 944 ribu rupiah dibandingkan tahun 2014, sehingga di tahun 2019 rata-rata pengeluaran perkapita menjadi 7,36 juta rupiah.

Gambar 1.10. Pengeluaran Per Kapita Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

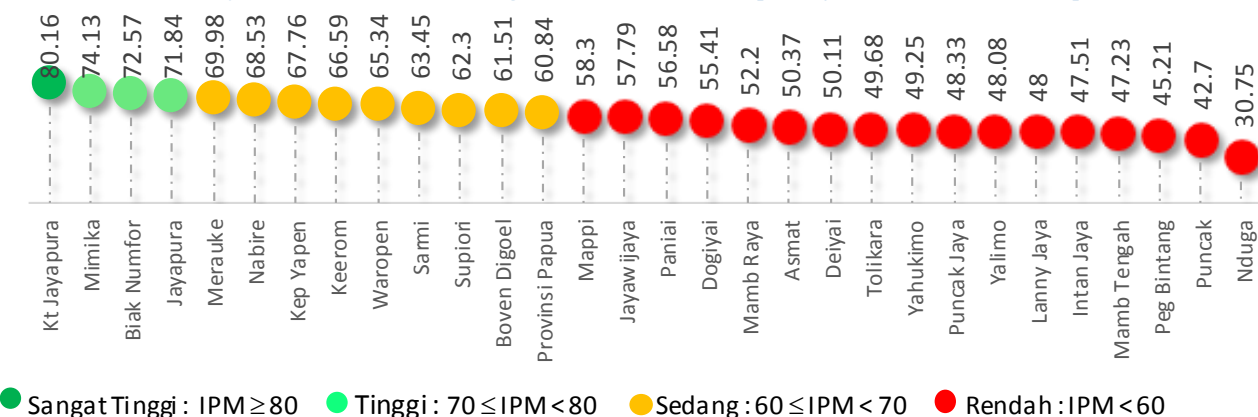


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Papua masih terlihat sangat tinggi. Misalkan di tahun 2019, disparitas antara IPM tertinggi yaitu Kota Jayapura (80,16) dengan terendah di Kabupaten Nduga (30,75) adalah sebesar 160,68%.

Gambar 1.11. Penyebaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019



● Sangat Tinggi : IPM ≥ 80 ● Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 ● Sedang : 60 ≤ IPM < 70 ● Rendah : IPM < 60

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.12. Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas Di Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

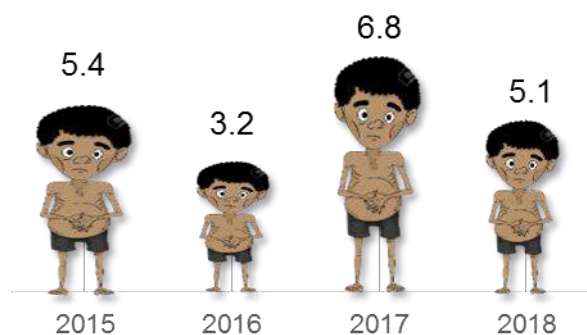
Kasus Gizi Buruk di Papua cenderung fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pencegahan dan penanganan gizi buruk di Papua, yang mana tercatat pada tahun 2018 persentase gizi buruk sebesar 5,1%.

Sementara itu balita dengan Gizi Baik mengalami penurunan. Khususnya untuk tahun 2016-2018 penurunannya mencapai 3,5% per tahun. Hal ini patut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah provinsi.

Keberhasilan dalam menjalankan program-program literasi memberi dampak peningkatan Angka Melek Huruf di Papua.

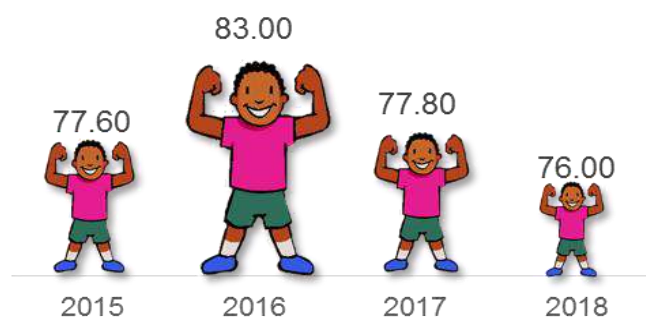
Sepanjang tahun 2016-2019 misalkan rata-rata kenaikan Angka Melek Huruf untuk penduduk 15 tahun ke atas kurang lebih sebesar 2,33% per tahun sehingga di tahun 2019 Angka Melek Huruf Papua mencapai 78%.

Gambar 1.13. Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Buruk Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



Sumber : Kemenkes RI, 2020 (data diolah)

Gambar 1.14. Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Dengan Status Gizi Baik Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



Sumber : Kemenkes RI, 2020 (data diolah)

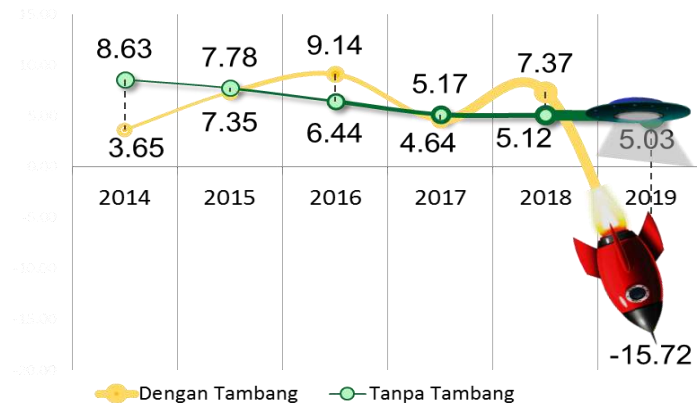


1.3. PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan.

Disini terlihat, jika disertakan sektor pertambangan maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua hanya 2,74%, akibat adanya tekanan di tahun 2019. Sedangkan tanpa sektor pertambangan rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 6,36% per tahun, yang cenderung juga melambat tapi masih dikisaran positif yang cukup tinggi.

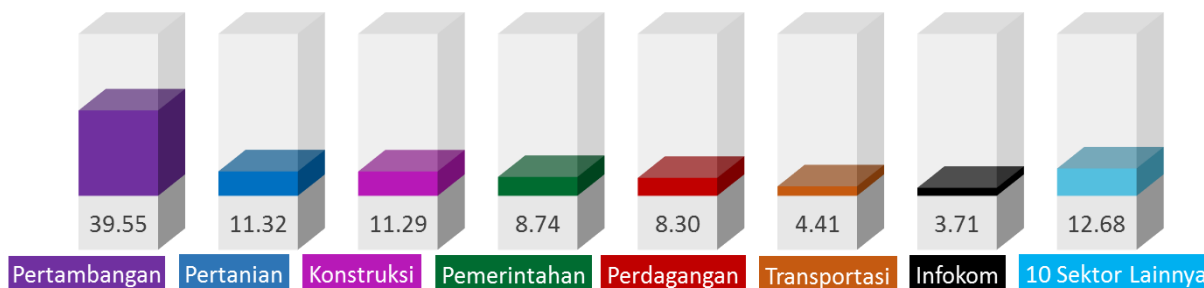
Gambar 1.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Provinsi Papua 2014-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Struktur ekonomi Papua dikuasai oleh sektor-sektor yang ekstratif. Khususnya sektor pertambangan yang menguasai sepertiga PDRB wilayah Papua yaitu 39,55% per tahun, dan sektor pertanian sebesar 11,32% per tahun selama periode 2014-2019.

Gambar 1.16. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2014-2019 (rata-rata %)

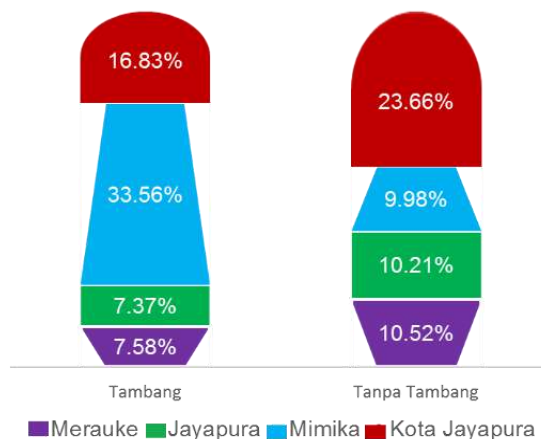


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Perekonomian Papua terkonsentrasi. Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke dan Kota Jayapura memiliki andil yang paling besar terhadap total PDRB se Papua, keempatnya kurang lebih 65,33% jika dengan sektor tambang, dan 54,37% tanpa sektor tambang. Adanya konsentrasi ekonomi tersebut juga mengindikasikan telah terjadi Aglomerasi Ekonomi di Papua.



Gambar 1.17. Pemusatan Ekonomi Papua Tahun 2019

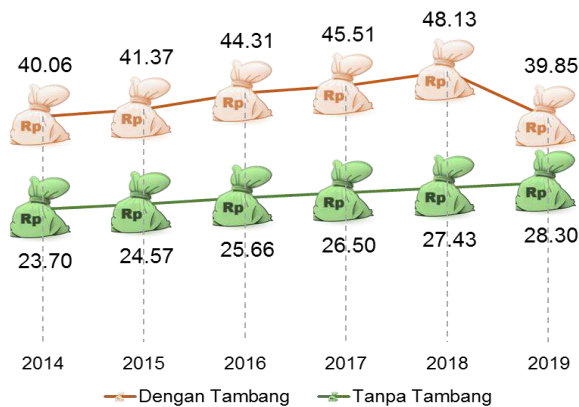


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



1.4. PENDAPATAN PER KAPITA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Gambar 1.18. Pendapatan Perkapita ADHK 2010 Provinsi Papua Tahun 2014-2019



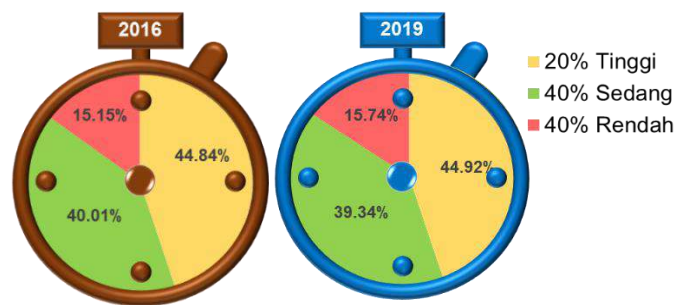
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Penduduk berpendapatan rendah sedikit menyerap hasil pembangunan ekonomi.

Sebagaimana yang terlihat pada distribusi pendapatan menurut versi Bank Dunia, pada 2016, sekitar 44,84% pendapatan regional terdistribusi kepada penduduk yang berpendapatan tinggi, 40,01% ke pendapatan sedang, dan hanya 15,15% yang diserap penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang tidak beda jauh juga terlihat di tahun 2019, penduduk dengan pendapatan rendah masih yang paling kecil memperoleh porsi pendapatan regional, yaitu 15,74%.

Kesejahteraan penduduk Papua semakin meningkat. Kondisi ini tercermin pada perkembangan pendapatan per kapita Papua selama tahun 2014-2019 yang meningkat sebesar 0,32% (dengan sektor tambang) dan 3,61% per tahun (tanpa sektor tambang), dimana pada tahun 2019 pendapatan per kapita Papua sebesar Rp.39,85 juta (dengan tambang) dan Rp. 28,30 juta (tanpa sektor tambang).

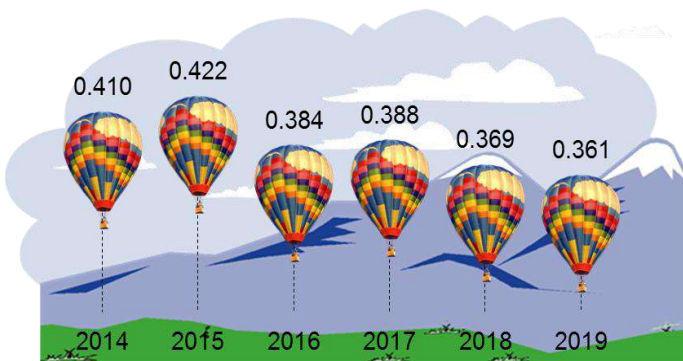
Gambar 1.19. Distribusi Pendapatan Di Provinsi Papua Versi Bank Dunia Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

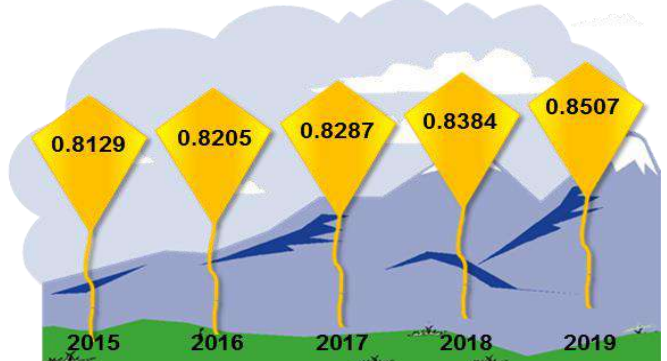
Ketimpangan pendapatan antarpenduduk semakin menurun. Kecenderungan ini tergambar pada trend Gini Ratio tahun 2014-2019 yang mengalami penurunan 0,049 poin per tahun, dan tercatat pada tahun 2019 angka Gini Ratio Provinsi Papua sebesar 0,361 yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang (moderat). Akan tetapi di sisi lain, ketimpangan antarwilayah belum optimal diturunkan. Indikasinya terlihat pada angka Indeks Williamson (IW) yang relatif meningkat selama tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2019 nilai IW Papua tercatat sebesar 0,8507 (ketimpangan tinggi).

Gambar 1.20. Ketimpangan Antar Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.21. Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019



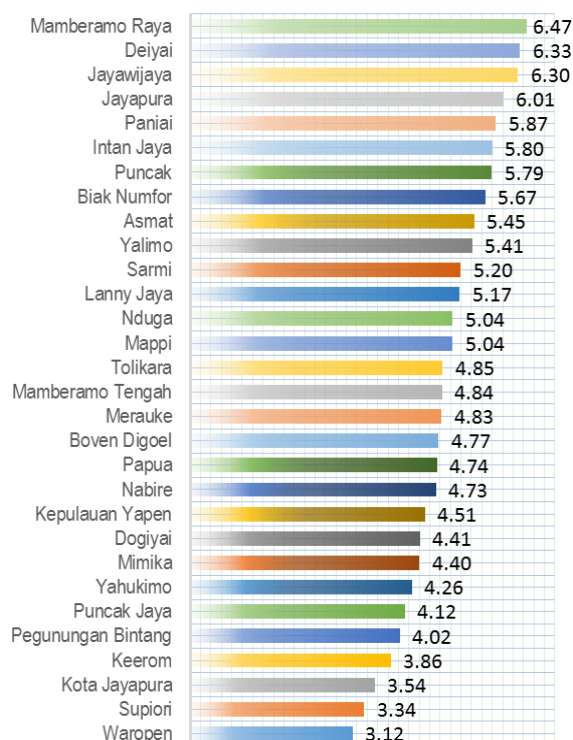
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



1.5. INFLASI DAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA

Perkembangan harga di Provinsi Papua semakin terkendali. Untuk tahun 2015-2019 misalkan tingkat inflasi di Papua (gabungan 2 kota) dapat ditekan sekitar 1,24% per tahun sehingga di tahun 2019 inflasi di Papua hanya sebesar 2,34%.

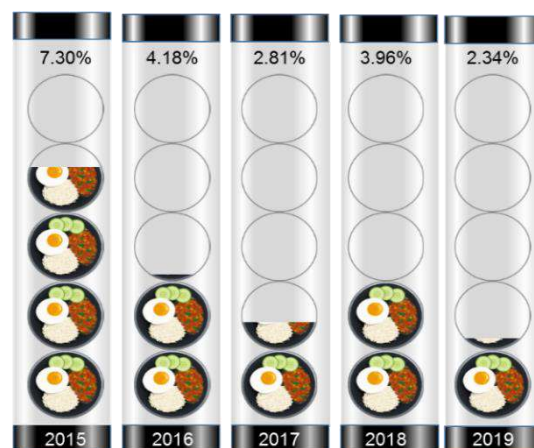
Gambar 1.23. Inflasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Berdasarkan Rata-rata Deflator 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Papua berhasil menekan tingkat kemahalan harga. Di tahun 2015 IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) Papua adalah 247,98%, dan tahun 2019 sebesar 218,59%, ini berarti IKK Papua dapat diturunkan sekitar -7,31% per tahun.

Gambar 1.22. Inflasi Gabungan 2 Kota Di Provinsi Papua 2015-2019 (%)



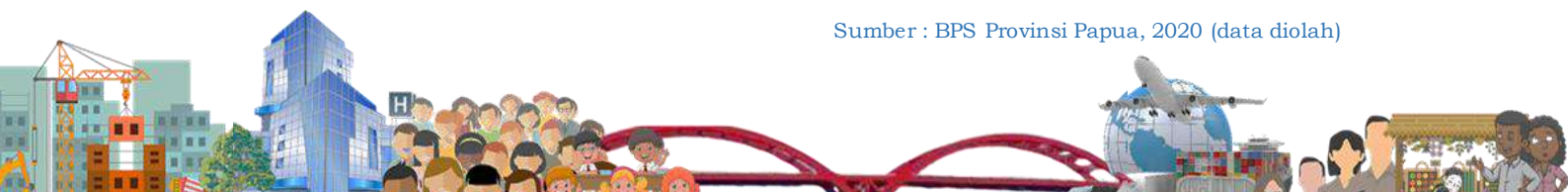
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Ada empat kabupaten dengan tingkat inflasi yang paling tinggi di Papua. Fenomena ini tervisualisasikan dari angka deflator kabupaten/kota di Papua tahun 2019, dimana Kabupaten Mamberamo, Deiyai, Jayawijaya dan Jayapura terindikasi mengalami inflasi berkisar 6,01 – 6,47% yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Namun demikian angka inflasi ini masih terkategori inflasi yang terkendali. Adapun yang paling rendah adalah Waropen hanya 3,12%.

Gambar 1.24. Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua 2015-2019

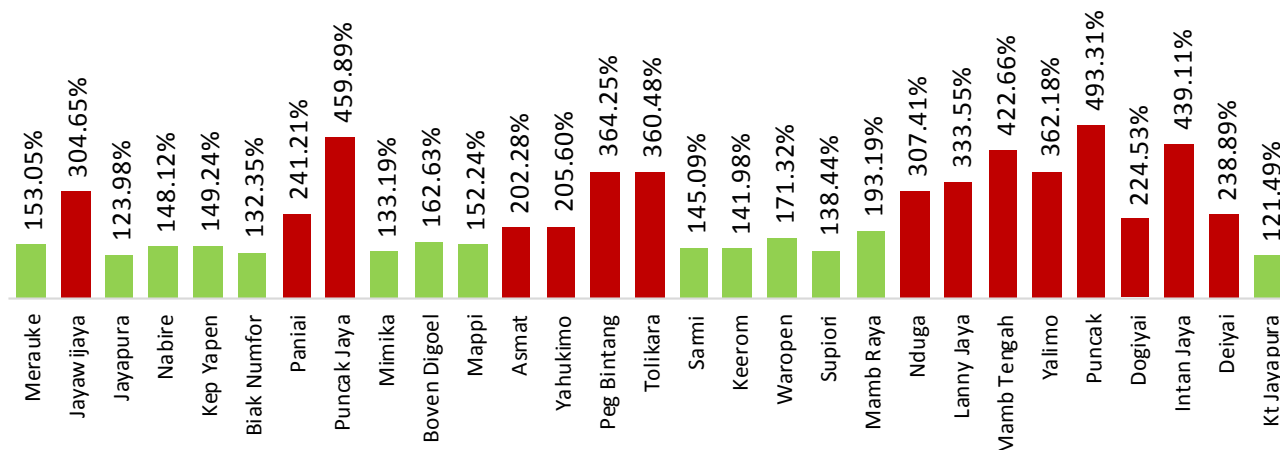


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Semua daerah pegunungan dan sebagian dataran rendah sulit akses di Papua mempunyai IKK yang sangat tinggi. Rata-rata IKK di daerah-daerah tersebut di atas 200%, dan 4 diantaranya lebih dari 400% yaitu Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Puncak dan Intan Jaya.

Gambar 1.25. Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2019

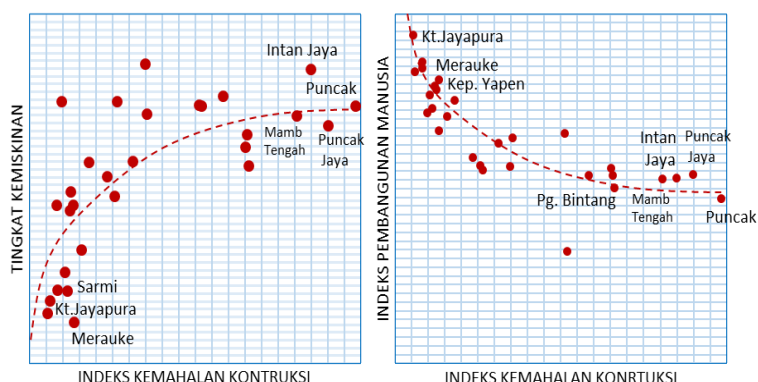


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Terdapat korelasi yang sangat erat antara IKK dengan tingkat kemiskinan dan IPM.

Korelasi dengan kemiskinan memiliki arah yang positif, artinya semakin tinggi IKK di suatu daerah maka dipastikan semakin tinggi tingkat kemiskinan, begitu sebaliknya. Sedangkan dengan IPM arahnya negatif, yang menandakan semakin tinggi IKK semakin rendah IPM, begitu sebaliknya. Disini IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Karenanya sangatlah tidak *fair* jika membandingkan kemiskinan dan IPM di Papua dengan daerah lainnyadi Indonesia tanpa memperhatikan variabel IKK.

Gambar 1.26. Korelasi Antara Indeks Kemahalan Kontruksi dengan Kemiskinan dan IPM Di Papua



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

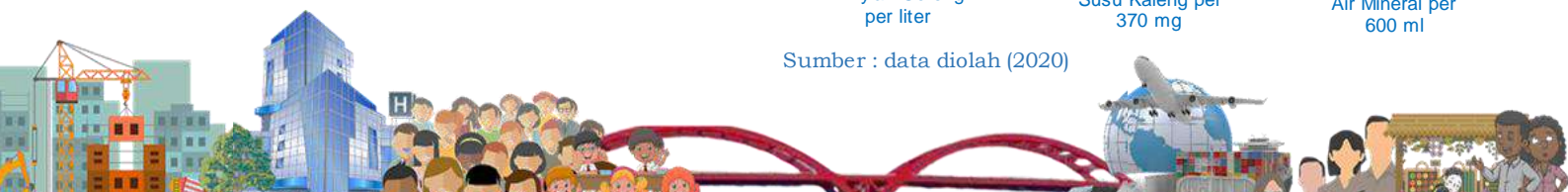
Disparitas harga bahan-bahan pokok di Papua sangat tinggi.

Sebagai misal untuk tahun 2019, jika Kota Jayapura dijadikan *benchmark* terlihat bahwa beberapa harga kebutuhan pokok penting seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, susu kaleng dan air mineral, rata-rata disparitas harganya dengan daerah-daerah pegunungan (misalkan Jayawijaya dan Puncak Jaya) dan pantai (misalkan Waropen dan Mamberamo Raya) bisa mencapai 107,73%. Disparitas harga yang paling tinggi dengan Kabupaten Jayawijaya rata-rata 119,14% dan Puncak Jaya 183,92%.

Gambar 1.27. Disparitas Harga Beberapa Bahan Pokok Penting Di Papua Tahun 2019/2020



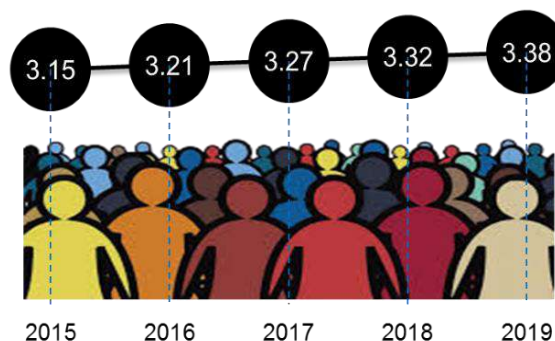
Sumber : data diolah (2020)



1.6. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Perkembangan penduduk di Provinsi Papua sangat terkendali. Sepanjang tahun 2015-2019 misalkan, pertumbuhannya hanya 1,78% per tahun, sehingga pada tahun 2019 tercatat penduduk Papua sebesar 3,38 juta jiwa

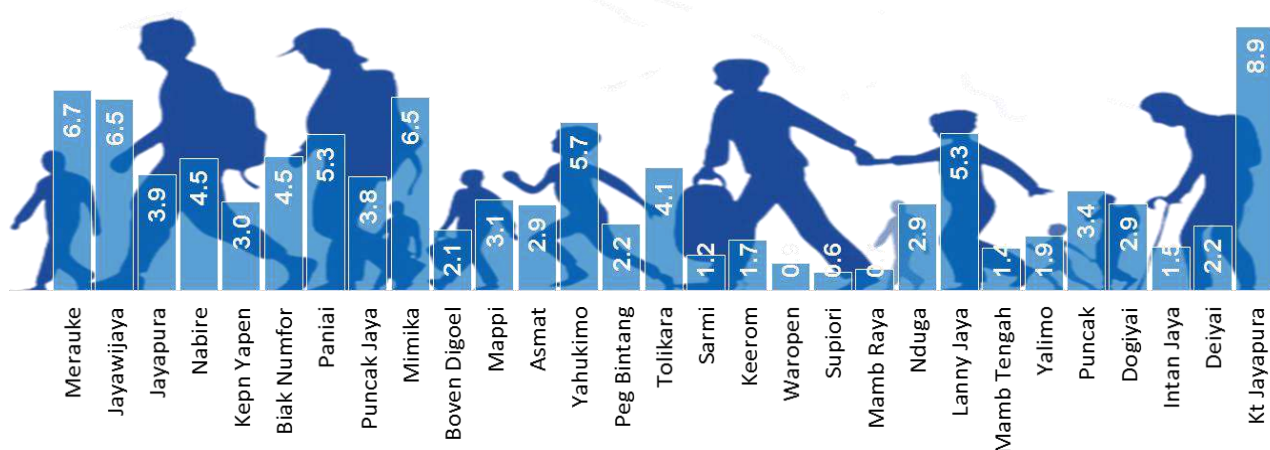
Gambar 1.28. Perkembangan Penduduk Di Provinsi Papua 2015-2019 (juta jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Penduduk Papua terkonsentrasi pada 4 (empat) daerah urban terbesar. Ke-4 daerah yang dimaksud adalah Kota Jayapura (8,9%), Kabupaten Merauke (6,7%), Jayawijaya (6,5%) dan Mimika (6,5%).

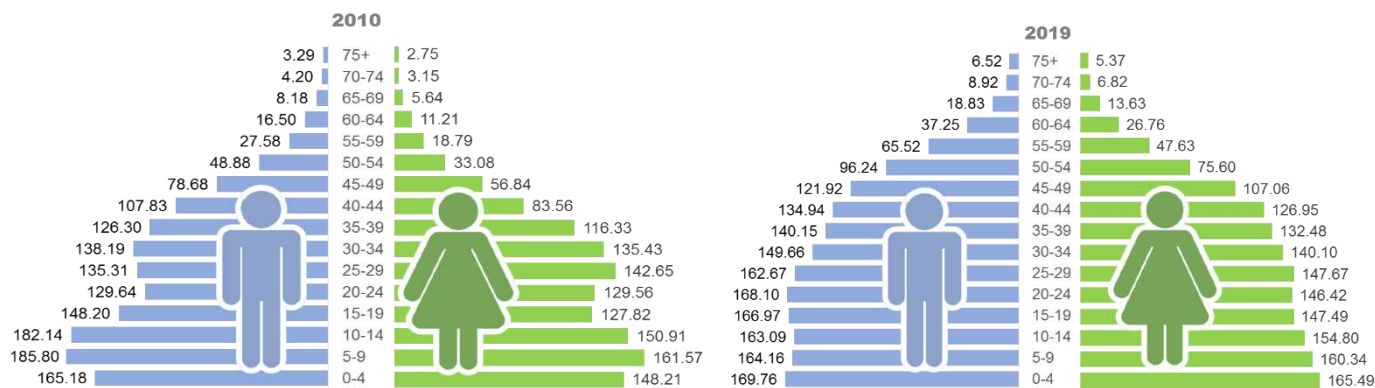
Gambar 1.29. Komposisi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Provinsi Papua cenderung mengalami transisi demografi. Fenomena ini dapat diperhatikan dari perubahan bentuk piramida penduduk di tahun 2010 yang ekspansif relatif ke stasioner di tahun 2019. Namun demikian komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif tidak mengalami perubahan, penduduk laki-laki masih mendominasi di tahun 2019 dibandingkan perempuan.

Gambar 1.30. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2019 (ribu jiwa)



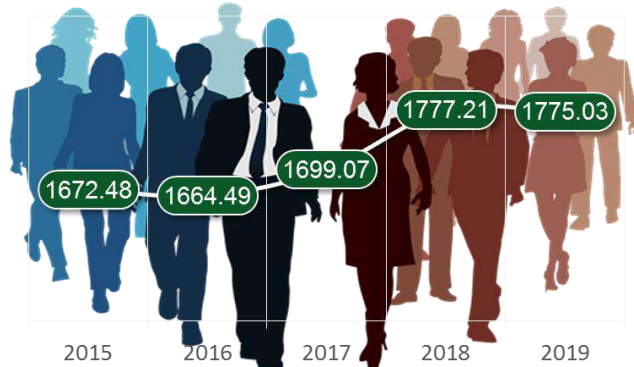
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Pertambahan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Papua cukup pesat.

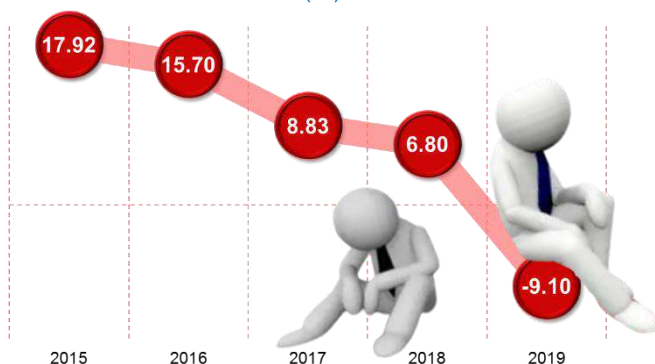
Rata-rata selama tahun 2015-2019 terdapat tambahan orang yang bekerja sekitar 25,64 ribu orang per tahun atau 1,50% per tahun, dimana pada tahun 2019 ada 1.773,03 ribu orang yang terserap dalam lapangan kerja.

Gambar 1.31. Jumlah Orang Bekerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (ribu orang)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.32. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

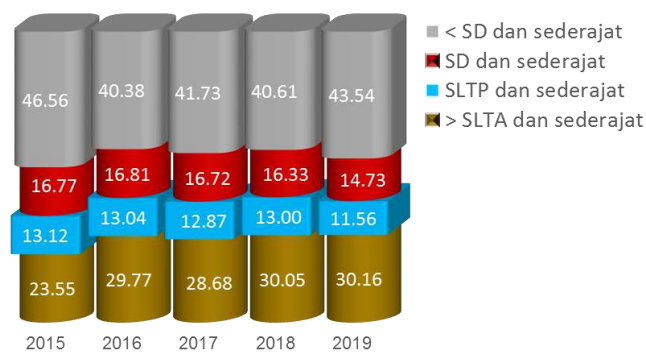
Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Provinsi Papua cenderung melambat.

Dari angka pertumbuhan sebesar 17,92% di tahun 2015 menjadi 6,80% di tahun 2018, dan mengalami kontraksi yang besar di tahun 2019 yaitu -9,10%, sebagai dampak dari menurunnya tingkat produksi tambang di tahun 2019 karena adanya permasalahan internal di perusahaan tambang terbesar Papua yaitu PT.Freeport Indonesia. Secara keseluruhan, dalam periode 2015-2019 laju pertumbuhan PDRB tenaga kerja Provinsi Papua masih mencatat positif 8,03% per tahun.

Tenaga kerja di Papua sebagian besar berpendidikan rendah.

Selama tahun 2015-2019 tenaga kerja yang berpendidikan SD/ sederajat dan dibawahnya sangat mendominasi komposisi tenaga kerja, rata-rata sekitar 58,84% per tahun. Sementara yang berpendidikan SLTA dan keatas hanya sebesar 28,44% per tahun.

Gambar 1.33. Komposisi Tenaga Kerja Provinsi Papua Menurut Pendidikan Tahun 2015-2019 (%)

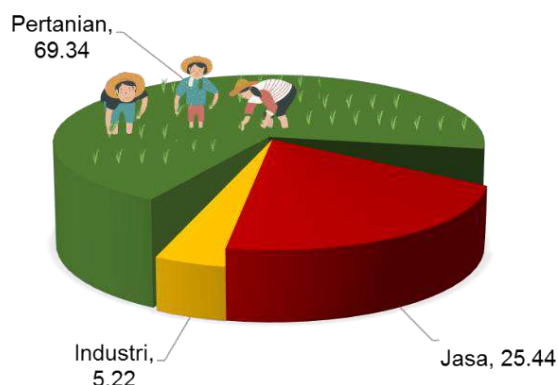


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



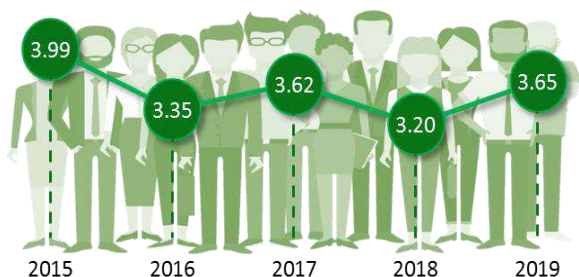
Sektor pertanian menjadi penyanggah pasar lapangan kerja di Papua. Fenomena ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja di Papua berpendidikan rendah, sehingga pasar tenaga kerja yang paling banyak menyerapnya adalah sektor pertanian yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan dan keahlian yang tinggi. Rata-rata daya serap tenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 2015-2019 adalah 69,34% per tahun.

Gambar 1.34. Struktur Tenaga Kerja Provinsi Papua Rata-rata Periode 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

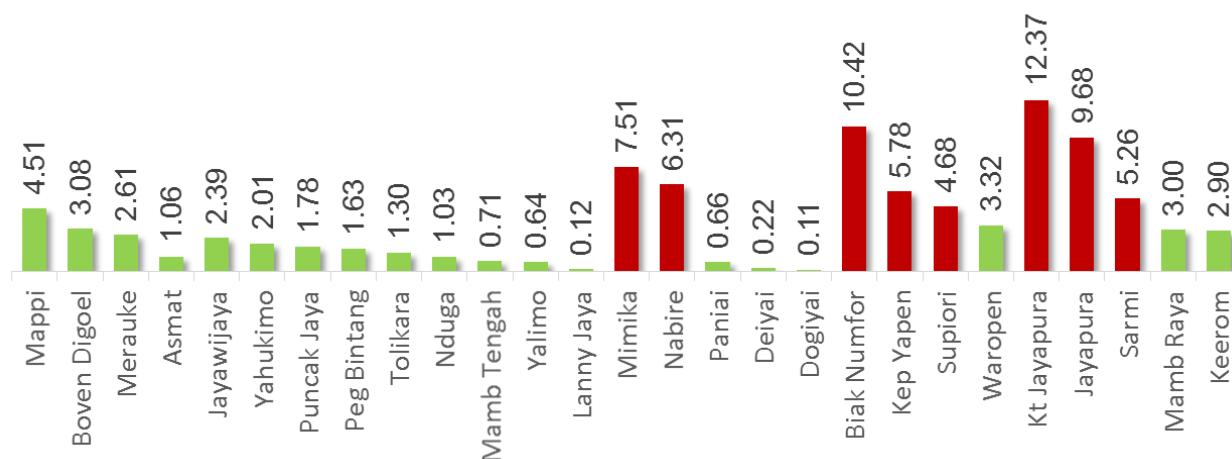
Gambar 1.35. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Tingkat pengangguran di Papua semakin menurun. Pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua sebesar 3,99%, dan di tahun 2019 sekitar 3,65%, ini berarti ada penurunan sekitar 0,34%. Adapun TPT yang paling tinggi terjadi di Kota Jayapura (12,37%) dan Biak Numfor (10,42%). Lainnya di bawah 10%, dengan TPT yang terendah di Lanny Jaya, Yalimo dan Mamberamo Tengah semuanya di bawah 1%.

Gambar 1.36. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Tahun 2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



1.7. KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama tahun 2015-2019 adalah 6,59% per tahun yang dipicu oleh peningkatan PAD yang sangat pesat sebesar 22% per tahun. Sedangkan pertumbuhan belanja daerah hanya 2,01% per tahun, dimana cenderung Belanja Tidak Langsung (BTL) menurun, dan Belanja Langsung (BL) terus meningkat.

Gambar 1.37. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (dalam milyar rupiah)

Komponen APBD	2015	2016	2017	2018	2019	growth
PENDAPATAN DAERAH	11.805,77	12.567,84	13.006,81	13.486,06	15.239,94	6,59%
Pendapatan Asli Daerah	912,91	1.019,73	1.015,78	1.050,37	2.027,64	22,08%
Dana Perimbangan	3.256,24	3.595,09	3.780,55	4.414,24	4.522,41	8,56%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	7.636,07	7.947,79	8.205,15	8.020,85	8.674,68	3,24%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,55	5,23	5,33	0,59	15,22	129,49%
BELANJA DAERAH	12.396,45	11.968,49	13.303,28	13.186,89	13.421,68	2,01%
Belanja Tidak Langsung	6.980,19	7.018,20	7.614,48	8.775,00	6.908,86	-0,26%
Belanja Langsung	5.416,26	4.950,29	5.688,80	4.411,89	6.512,81	4,72%
PEMBIAYAAN DAERAH	1.155,86	473,50	868,78	727,41	927,05	-5,37%
Penerimaan Pembiayaan	1.180,86	503,50	1.009,24	843,66	1.030,92	-3,34%
Pengeluaran Pembiayaan	25,00	30,00	140,46	116,25	103,88	42,77%
SILPA	565,18	1.072,84	572,31	1.026,58	2.745,31	48,46%
Jenis Data	-	Perda	Audited	Audited	Audited	

Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 1.38. Tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019

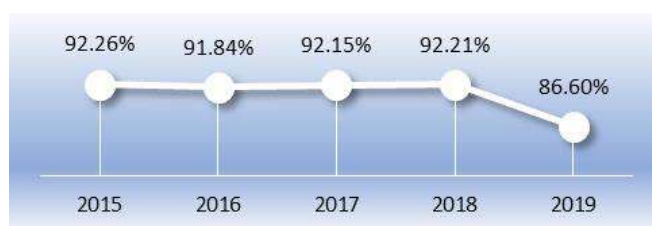


Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua terindikasi sangat rendah sehingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Kondisi ini terjadi karena sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua hanya 9,90% per tahun.

Rendahnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan ketergantungan fiskal di Provinsi Papua sangat tinggi. Sebagaimana yang divisualisasikan selama tahun 2015-2019 rata-rata tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua mencapai 91,01% per tahun, yang masuk dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, dan cenderung tidak banyak mengalami perubahan.

Gambar 1.39. Tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Gambar 1.40. Tingkat Desentralisasi Fiskal Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Papua sangat kurang. Indikasinya dapat diperhatikan pada perkembangan rasio desentralisasi fiskal selama periode 2015-2019 yang menunjukkan persentasenya hanya sebesar 8,95% per tahun.



Walaupun kinerja penerimaan PAD sangat efektif, namun pengelolaannya secara makro dapat dinilai kurang efisien. Seperti yang terlihat pada tahun 2015-2019, tingkat efektifitas PAD Provinsi Papua mencapai 118,99% per tahun, yang menandakan realisasinya selalu diatas 100% dari target yang ditetapkan. Akan tetapi karena belanja rutin (pegawai) yang dikeluarkan selama ini selalu jauh diatas 100% dibandingkan penerimaan PAD akhirnya tingkat efisiensi PAD Provinsi Papua dikategorikan Kurang Efisien. Rata-rata inefisiensi penerimaan PAD sebesar 117,47% per tahun. Dengan kata lain belanja rutin yang dikeluarkan lebih besar 17,47% dibandingkan penerimaan PAD.

Gambar 1.41. Tingkat Efektifitas PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

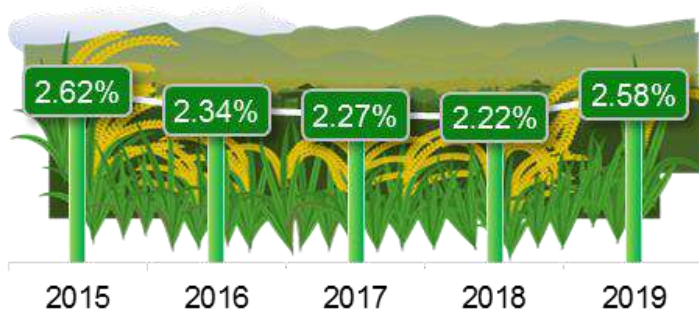
Gambar 1.42. Tingkat Efisiensi PAD Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2020 (data diolah)

1.8. KONTRIBUSI SEKTORAL DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH

Gambar 1.43. Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



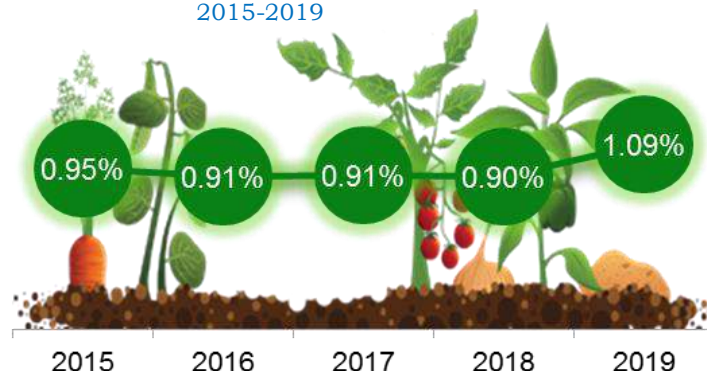
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Disisi lain andil sektor tanaman hortikultur terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusinya meningkat sebesar 0,036% per tahun, dimana kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu 0,19% dibandingkan tahun 2018. Setiap tahun kontribusi sektor tanaman hortikultur kurang lebih 0,95% terhadap PDRB Papua, yang ditopang oleh komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan.

Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB Papua relatif menurun.

Seperti yang terlihat pada tahun 2015-2019, rata-rata mengalami penurunan -0,011% per tahun, sehingga di tahun 2019 kontribusinya menjadi 2,58%. Padahal sektor ini merupakan tumpuan mata pencaharian dan sumber ketahanan pangan bagi penduduk miskin di Papua. Terutama pada komoditi umbi-umbian dan padi.

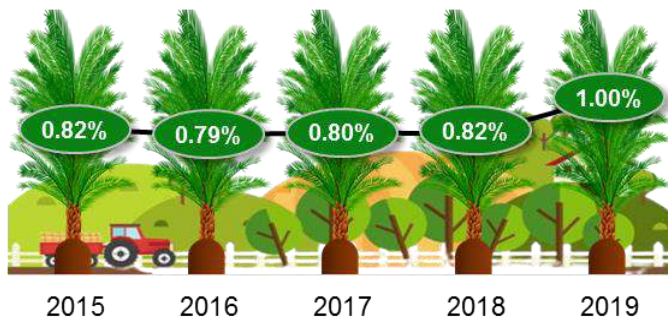
Gambar 1.44. Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultur Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Gambar 1.45. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019

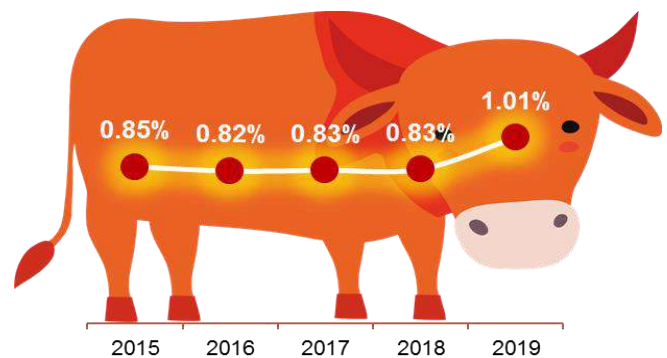


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Andil sektor peternakan dalam perekonomian Papua juga paling rendah dan cenderung stagnan. Dalam hal ini kontribusinya selama periode 2015-2019 hanya bergerak 0,040% per tahun. Dimana rata-rata kontribusi sektor peternakan hanya mencapai 0,87%. Jenis peternakan yang berkembang selama ini adalah peternakan rakyat, khususnya untuk ternak ayam, kambing dan sapi.

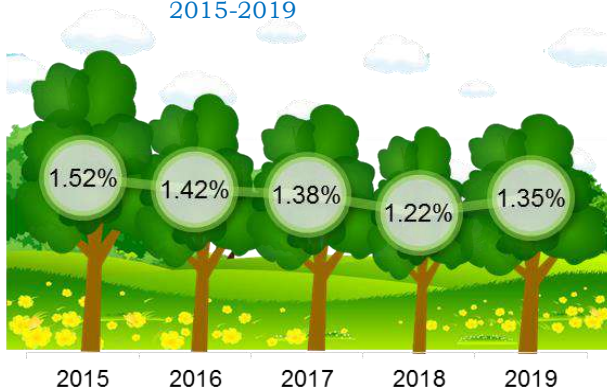
Potensi sektor perkebunan yang begitu besar di Papua tampaknya belum dikelola optimal. Indikasinya dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Papua hanya sekitar 0,82-1,00% selama periode 2015-2019, yang tampak tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Adapun komoditi andalan perkebunan Papua selama ini adalah kelapa sawit, kelapa dalam, sagu, dan coklat.

Gambar 1.46. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.47. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019

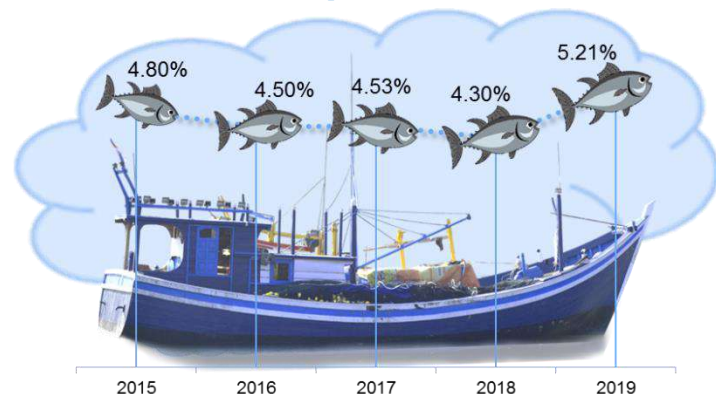


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Papua cenderung menurun. Hal dapat dilihat sepanjang tahun 2015-2019 yang mengalami penurunan -0,043% per tahun. Dimana pada periode tersebut rata-rata kontribusi sektor kehutanan yang dimotori oleh hutan kayu terhadap PDRB Papua sebesar 1,38% per tahun.

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar berkontribusi terhadap PDRB Papua. Selama tahun 2015-2019 misalkan, rata-rata kontribusinya bisa mencapai 4,67% per tahun, dengan kenaikannya sekitar 0,101% per tahun. Sub sektor perikanan yang paling berkembang selama ini adalah perikanan laut, terutama perikanan tangkap.

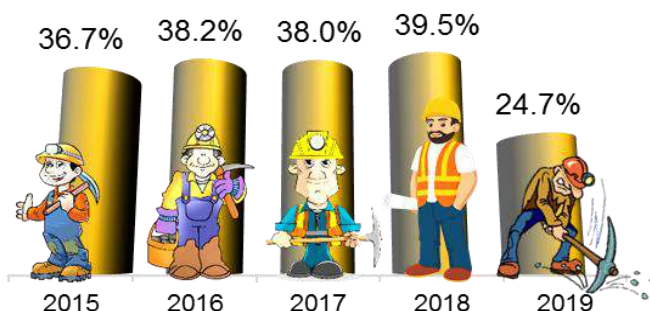
Gambar 1.48. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Gambar 1.49. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019

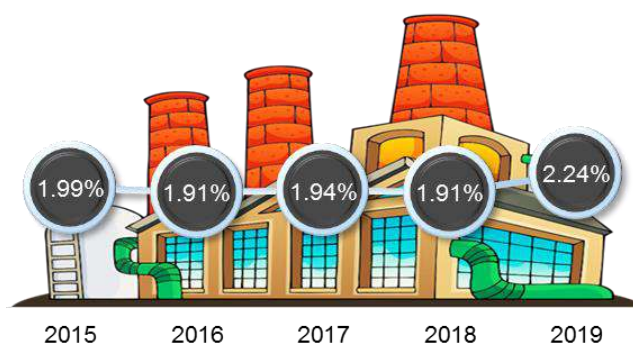


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Provinsi Papua masih tergolong daerah non industrialisasi. Argumentasinya karena kontribusi sektor industri terhadap PDRB Papua selama tahun 2015-2019 selalu di bawah 10% (kriteria UNIDO), kurang lebih sekitar 2% per tahun. Dampaknya, ketergantungan Papua terhadap berbagai produk industri dari luar sangat tinggi. Selama ini sektor industri yang berkembang cepat sebatas pada industri mikro dan kecil dengan jumlah unit usaha, produksi dan investasi yang kurang signifikan memperbesar porsi sektor industri dalam pangsa PDRB Papua.

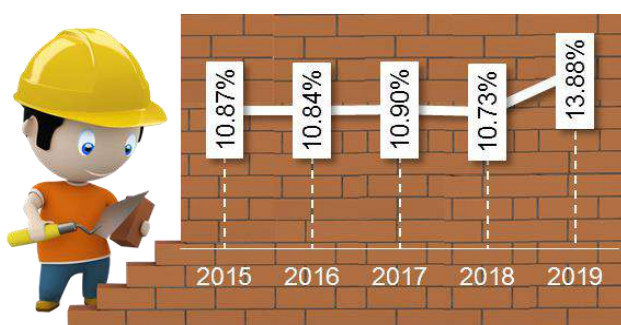
Struktur ekonomi Papua sangat dikendalikan oleh sektor pertambangan. Ini disebabkan perannya dalam menciptakan produk regional Papua paling tinggi dan mendominasi struktur ekonomi wilayah, rata-rata 35,40% per tahun, sehingga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Papua juga sangat ditentukan oleh variasi naik turunnya produksi tambang. Dua komoditi andalan di sektor pertambangan Papua selama ini adalah tembaga dan emas

Gambar 1.50. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 1.51. Kontribusi Sektor Kontruksi Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019

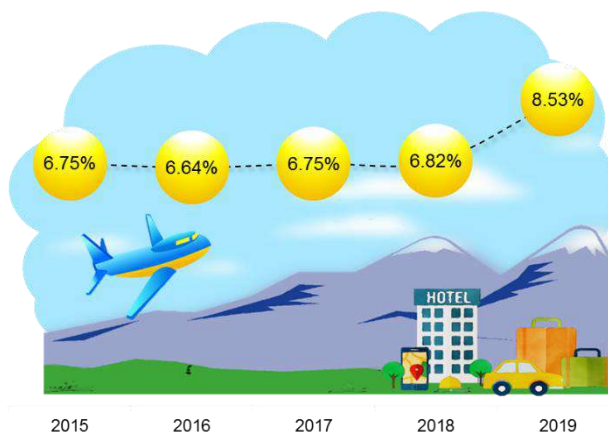


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sektor kontruksi merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian wilayah Papua. Sebagai indikator dapat dilihat tandilnya dalam menciptakan PDRB Papua selama tahun 2015-2019 mencapai 11,44% per tahun. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Papua selama ini menja di faktor pendorong yang sangat dominan dalam memperbesar porsi sektor kontruksi dalam struktur PDRB.

Peranan sektor pariwisata dalam mendorong ekonomi Papua terus meningkat. Sepanjang tahun 2015-2019 misalkan, sektor yang digerakan oleh aktifitas transportasi, jasa angkutan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa hiburan ini mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Papua sekitar 7,10% per tahun yang cenderung mengalami peningkatan.

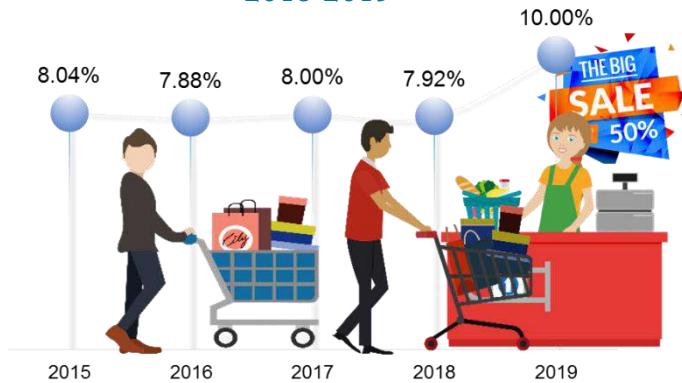
Gambar 1.52. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



Gambar 1.53. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Sektor perdagangan termasuk penyumbang terbesar terhadap PDRB Papua. Kontribusinya selama tahun 2015-2019 bisa mencapai 8,37% pertahun, yang dimotori oleh perdagangan besar dan kecil, seperti pertokoan, super market dan mall, yang banyak tersebar di beberapa kota besar Papua, antara lain di Kota Jayapura, Merauke, Timika, Biak Numfor dan Nabire.

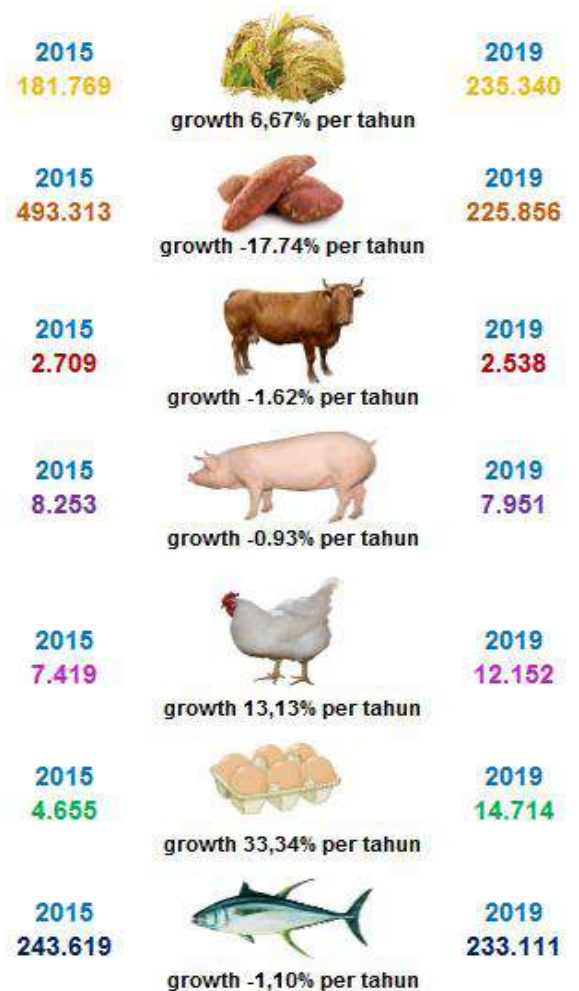
1.9. KETAHANAN PANGAN

Perkembangan produksi komoditi penting bahan makanan di Papua sangat variatif.

Beberapa komoditi ada yang mengalami peningkatan tinggi, dan ada juga yang mengalami penurunan. Berikut perkembangan masing-masing komoditi pangan.

- ➔ Tingkat produksi padi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sekitar 6,67% per tahun.
- ➔ Sementara produksi umbi-umbian yang menjadi makanan pokok di Papua mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni -17,74% per tahun.
- ➔ Untuk produksi daging sapi, kecenderungan juga mengalami penurunan yaitu -1,62% per tahun.
- ➔ Termasuk produksi daging babi, relatif menurun sebesar -0,93% per tahun.
- ➔ Adapun produksi daging ayam mengalami peningkatan yang pesat, sekitar 13,13% per tahun.
- ➔ Begitu juga dengan hasil produksi ikutannya yaitu telur mengalami peningkatan yang lebih pesat, sebesar 33,34% per tahun
- ➔ Terakhir, produksi perikanan laut dan budidaya, kecenderungannya menurun sebesar -1,10% per tahun.

Gambar 1.54. Tingkat Produksi Komoditi Penting Bahan Makanan Di Provinsi Papua 2015 dan 2019 (dalam ton)



Sumber : Kementerian Pertanian RI, 2020 (data diolah)



Seiring dengan penurunan produksi beberapa komoditi pangan penting, Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Papua juga ikut menurun. Di tahun 2015 Skor PPH Papua adalah 85,20 yang terkategori tinggi, kemudian di tahun 2018 skornya turun menjadi 70,60 yang masuk dalam kategori sedang.

Gambar 1.55. Skor PPH Provinsi Papua 2015-2018

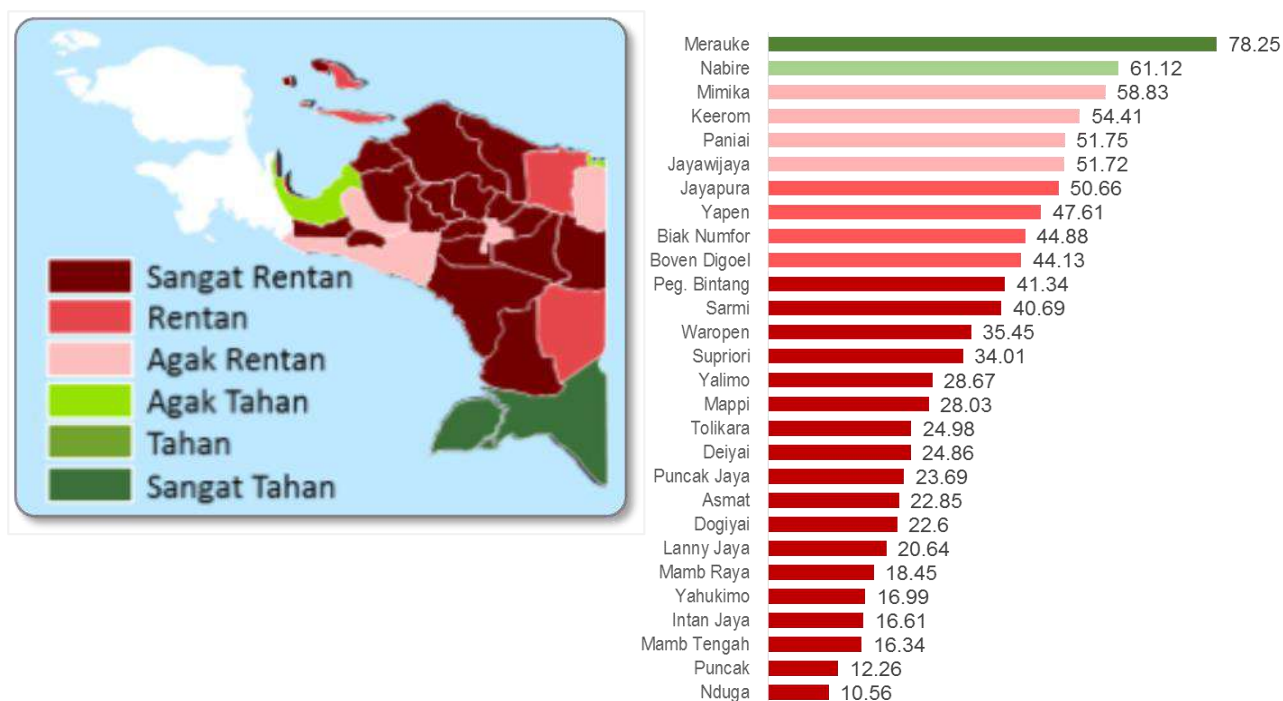


Sumber : BKP Kementerian Pertanian RI, 2020 (data diolah)

Kondisi ketahanan pangan setiap daerah di Papua perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Hal ini karena dari 28 kabupaten/kota yang terukur IKP (Indeks Ketahanan Pangan) terdapat 26 daerah yang kondisinya rentan pangan, yang terdiri atas 4 daerah Agak Rentan, 4 daerah Rentan, dan 18 daerah Sangat Rentan. Dapat dikatakan semua kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan dan dataran rendah sulit akses terkategori daerah-daerah yang sangat rentan pangan.

Gambar 1.56. Peta dan Indeks Ketahanan Pangan Di Provinsi Papua 2019



Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



ASPEK DAYA SAING DAERAH

Laporan Infografis Hasil Pembangunan
Provinsi Papua Tahun 2020

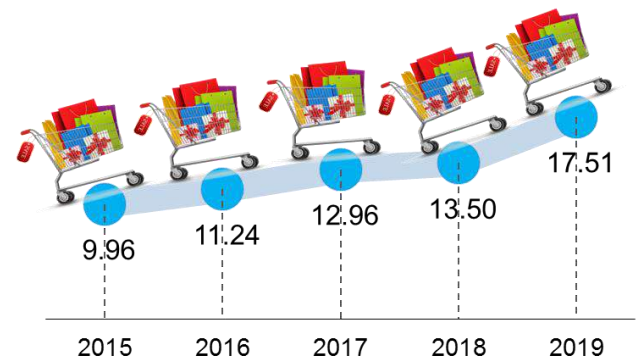


2.1. PENGELUARAN KONSUMSI PER KAPITA

Pengeluaran konsumsi per kapita penduduk Papua mengalami peningkatan yang pesat.

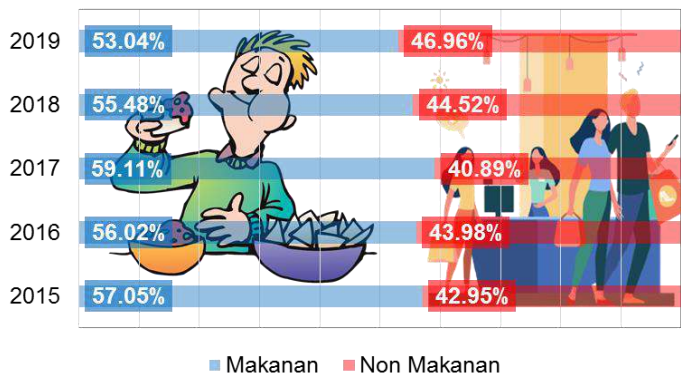
Setiap tahun rata-rata meningkat 15,52% selama tahun 2015-2019, dimana tercatat pada tahun 2019 pengeluaran per kapita di Papua sudah mencapai Rp 17,51 juta.

Gambar 2.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Menurut Kelompok Komoditi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Porsi pengeluaran penduduk terhadap kelompok non makanan semakin naik.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Papua bertambah baik. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran terhadap nonmakanan mencapai 46,96% atau meningkat sebanyak 4,01% dibandingkan tahun 2015.

Pengeluaran per kapita per tahun antarkabupaten/kota sangat variatif.

Namun sebagian besar terkumpul pada kelompok pengeluaran antara 10-15 juta per kapita per tahun, diantaranya Mappi, Asmat, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Nduga, total ada 14 kabupaten. Untuk daerah dengan pengeluaran per kapita di atas 20 juta per tahun adalah Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Jayawijaya dan Pegunungan Bintang.

Gambar 2.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019

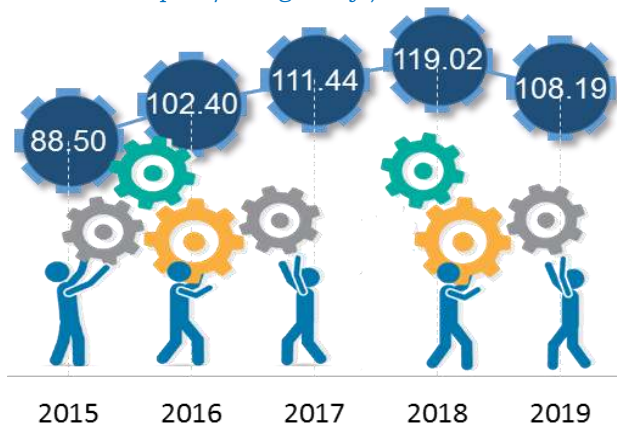


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



2.2. PRODUKTIFITAS DAN INVESTASI REGIONAL

Gambar 2.4. Produktifitas Regional Tenaga Kerja Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (juta rupiah/tenaga kerja)

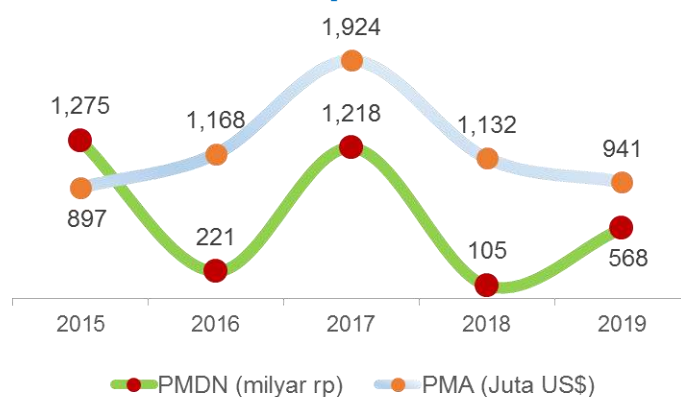


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Perkembangan investasi regional di Provinsi Papua sangat fluktuatif.

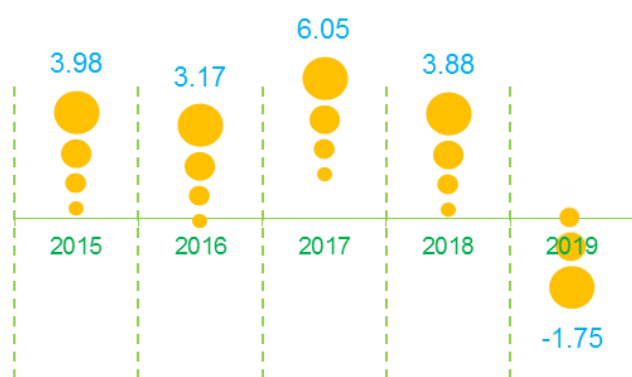
Hal ini divisualisasikan pada kecenderungan realisasi investasi di Papua selama tahun 2015-2019. Untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), rata-rata investasi yang direalisasikan sebesar Rp.677,18 milyar, dengan pertumbuhannya yang sangat fluktuatif naik turun. Sementara untuk PMA (Penanaman Modal Asing) cenderung stabil, dengan rata-rata realisasi investasinya sebesar US\$ 1,212.56 juta.

Gambar 2.5. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

Gambar 2.6. ICOR Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Provinsi Papua memiliki kinerja investasi dengan daya saing yang tinggi.

Indikasinya terlihat pada rata-rata ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) selama tahun 2015-2019 sebesar 3,07 yang tergolong moderat. Angka ICOR sebesar 3,07 tersebut menunjukkan bahwa untuk menaikkan pendapatan regional sebesar 1 milyar rupiah diperlukan investasi sebesar Rp. 3,07 milyar rupiah.

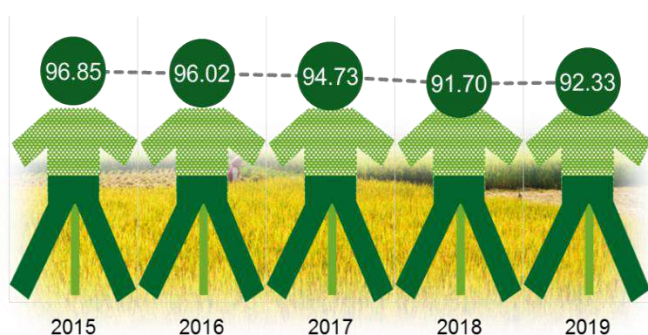
ICOR Kriteria ICOR. Semakin tinggi ICOR menggambarkan kinerja investasi semakin tidak efisien. Sebaliknya semakin rendah ICOR mengindikasikan investasi kurang dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Idealnya menurut para ahli ekonomi ICOR yang moderat antara 3 – 4 poin.



2.3. NILAI TUKAR PETANI

Penerimaan petani di Papua selalu mendapat tekanan dari pengeluaran konsumsinya. Kondisi ini disebabkan nilai bayar petani terus di atas nilai penerimaan petani, sebagaimana yang tercermin pada perkembangan komponen NTP (Nilai Tukar Petani) selama tahun 2015-2019, dimana Indeks Bayar Petani rata-rata 125,66 poin per tahun, sementara Indeks Diterima Petani lebih rendah, hanya 118,41 poin per tahun.

Gambar 2.8. Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019 (dalam %)

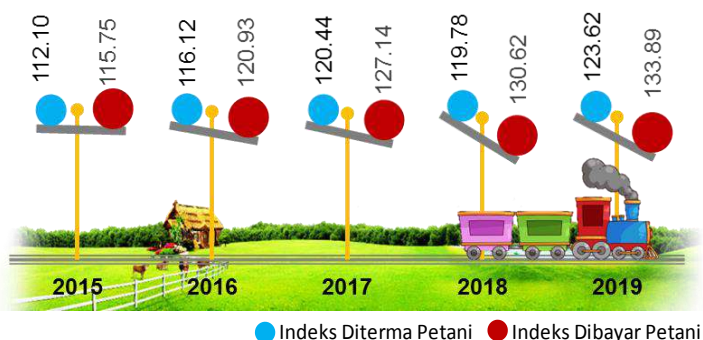


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Penilaian NTP secara sektoral menunjukkan nelayan dan peternak di Papua memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagaimana yang tergambarakan di tahun 2019, NTP sektor perikanan sebesar 101,20 poin, dan sektor peternakan sebesar 107,17 poin. Ini artinya, nelayan dan peternak di Papua mengalami surplus pendapatan karena penerimaan lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dengan demikian nelayan dan peternak jauh lebih sejahtera dibandingkan petani tanaman pangan/hortikultura/perkebunan yang memiliki NTP di bawah 100.

Gambar 2.7. Komponen Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Periode 2015-2019 (dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Neraca pendapatan petani Papua dalam kondisi yang terus defisit. Pada tahun 2015-2019 misalkan, defisitnya tampak semakin besar, yang ditandai dengan menurunnya NTP sebesar -1,13 poin per tahun, dan besarnya defisit sekitar -5,67 poin per tahun selama periodetersebut. Fenomena ini menandakan kesejahteraan petani secara umum di Papua belum pada kondisi yang baik.

Kriteria penilaian NTP menurut BPS

- *NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.*
- *NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.*
- *NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.*

Gambar 2.9. Nilai Tukar Petani Tahunan Di Provinsi Papua Menurut Sub Sektor Tahun 2019 (dalam %)

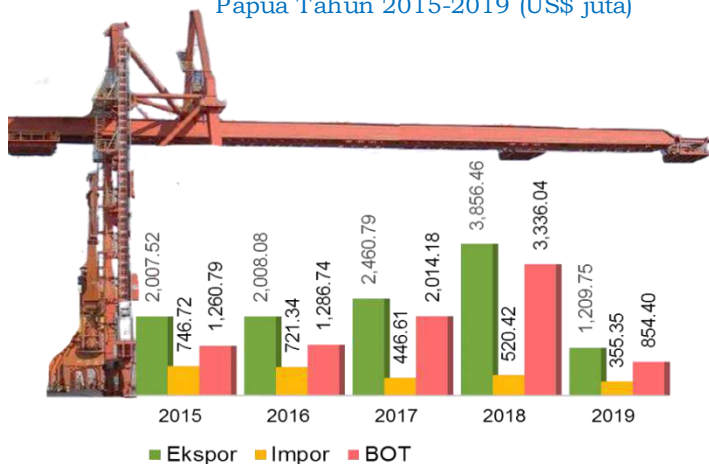


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

2.4. EKSPOR NONMIGAS

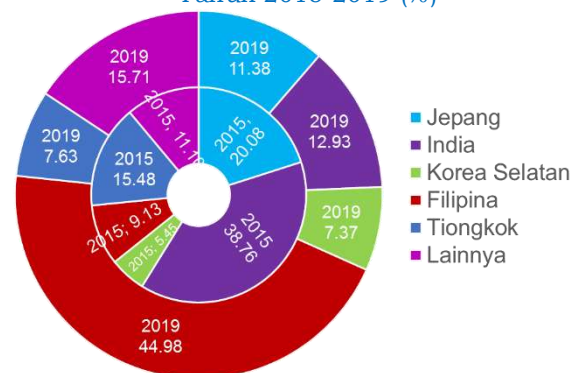
Neraca perdagangan luar negeri (BOT) Provinsi Papua selalu dalam keadaan surplus. Ini menandakan bahwa nilai ekspor Papua selalu lebih tinggi di bandingkan nilai impor. Selama tahun 2015-2019, rata-rata nilai BOT Papua sebesar 1,750.43 juta US\$ per tahun. Dimana ada 6 negara tujuan utama penyumbang surplus terbesar dalam neraca perdagangan Papua diantara 2015 dan 2019 yaitu Jepang, India, Korea Selatan, Filipina, dan Tiongkok. India merupakan negara tujuan ekspor terbesar di tahun 2015 yaitu 38,76%, dan Filipina di tahun 2019 sebesar 44,98%.

Gambar 2.10. Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (US\$ juta)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.11. Komposisi Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.12. Tabel Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Pelabuhan Asal (US\$ juta)

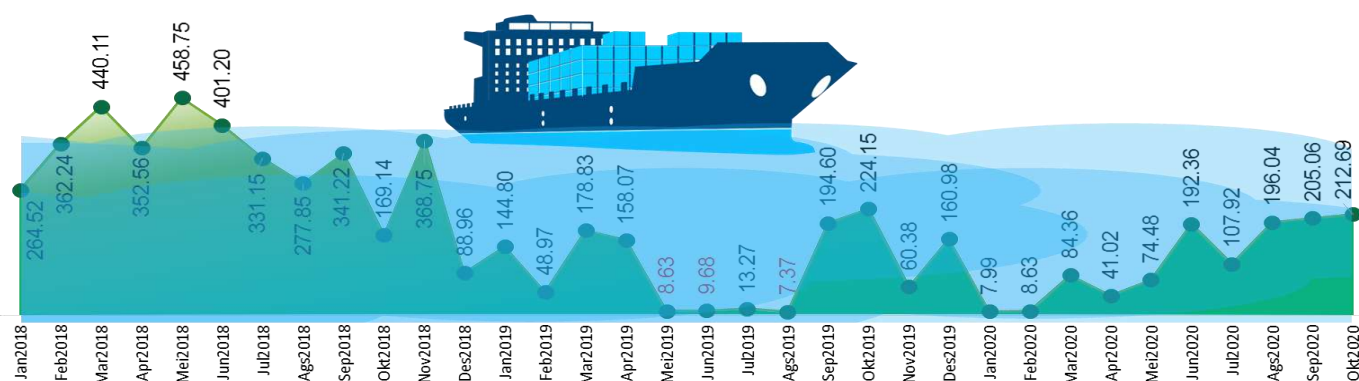
Pelabuhan Asal	2015	2016	2017	2018	2019
Frans Kaisepo	50.29	2.30	1.62		0.02
Jayapura	0.80	1.71	11.21	3.65	3.22
Serui	55.13	51.16	53.96	41.62	61.65
Amamapare	1,832.19	1,908.23	2,349.57	3,759.96	1,087.07
Sentani	0.25	0.11	0.12	0.02	0.07
Bade	68.54	44.57	43.92	50.42	52.32
Lainnya	0.33	0.0006	0.38	0.79	5.41
Jumlah	2,007.52	2,008.08	2,460.79	3,856.46	1,209.75

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Hampir seluruh ekspor Provinsi Papua berasal dari satu pelabuhan asal. Ini karena ada 1 pelabuhan asal yang menguasai pangsa muatan ekspor Papua lebih dari 90%, yaitu Pelabuhan Amamapre Kabupaten Mimika dengan nilai ekspornya rata-rata mencapai US\$2,187.40 juta atau sekitar 93.83% dari total ekspor Papua per tahun selama periode 2015-2019.

Nilai ekspor bulanan Provinsi Papua sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Terutama pada periode 2018-2020 rata-rata turun sebesar -0,66% per bulan. Sempat di bulan Maret, Mei dan Juni 2018 nilai ekspor Papua mengalami puncaknya sekitar 433.35 juta US\$ per bulan, namun setelah itu terus menurun hingga titik terendah di bulan Mei dan Juni 2019 sebesar 9.16 juta US\$ per bulan. Trend yang negatif ini disebabkan ekspor Papua sangat tergantung pada komoditi tambang (tembaga dan emas), sehingga pasang surutnya nilai ekspor sangat ditentukan oleh produksi tambang tersebut.

Gambar 2.13. Nilai Ekspor Bulanan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2018-2020 (US\$ juta)

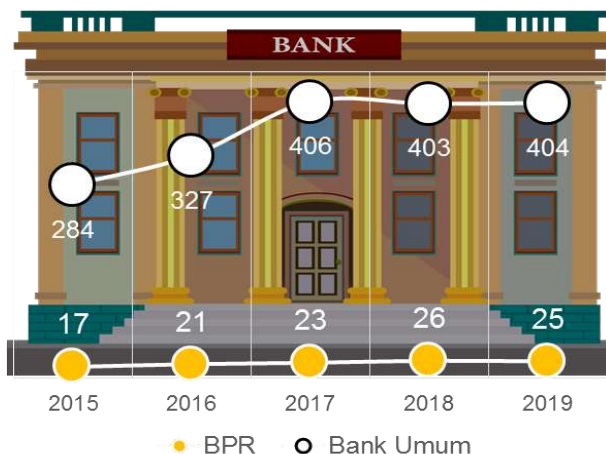


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)



2.5. SEKTOR PERBANKAN

Gambar 2.14. Jumlah Bank Umum dan BPR Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (unit)



Sumber : IDAP OJK RI, 2020 (data diolah)

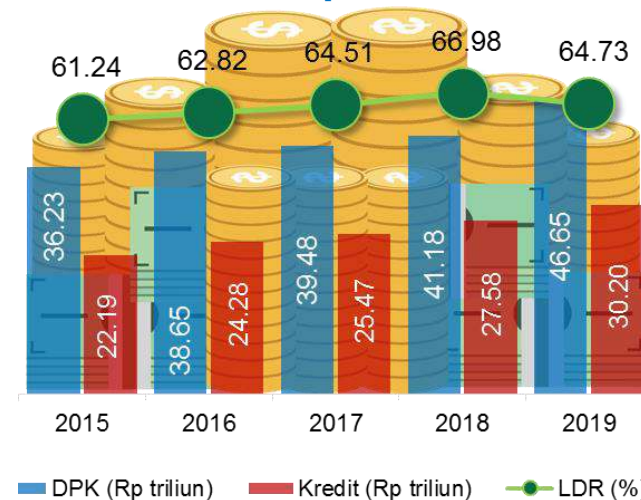
Rasio kredit terhadap simpanan pada bank umum (LDR) di Papua masih terjaga aman dan tampak terkendali.

Selama tahun 2015-2019 rasio LDR-nya hanya sebesar 64,06% per tahun, masih jauh di bawah ambang batas sesuai peraturan Bank Indonesia sebesar 94%. Fakta ini mengindikasikan bahwa bank umum di Papua masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ekspansi penyaluran kredit kepada masyarakat (personal dan swasta).

Kondisi perekonomian yang terus berkembang menjadi salah satu faktor yang mendorong jumlah bank di Papua terus mengalami peningkatan.

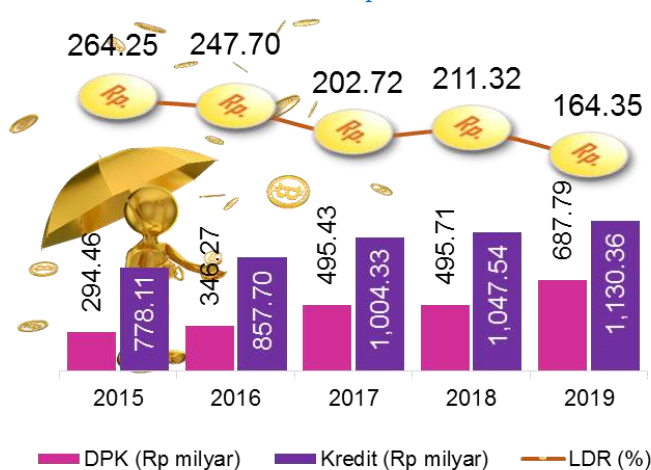
Baik pada bank umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) rata-rata mengalami peningkatan kurang lebih 9,67% per tahun selama periode 2015-2019. Total bank umum di tahun 2019 adalah 404 unit, sedangkan BPR sebanyak 25 unit.

Gambar 2.15. Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Umum Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : IDAP OJK RI, 2020 (data diolah)

Gambar 2.16. Dana Pihak Ketiga, Kredit, Dan Loan To Deposit Ratio Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber : IDAP OJK RI, 2020 (data diolah)

Lain halnya dengan BPR, terlihat rasio kredit terhadap simpanan sudah melampaui ambang batas.

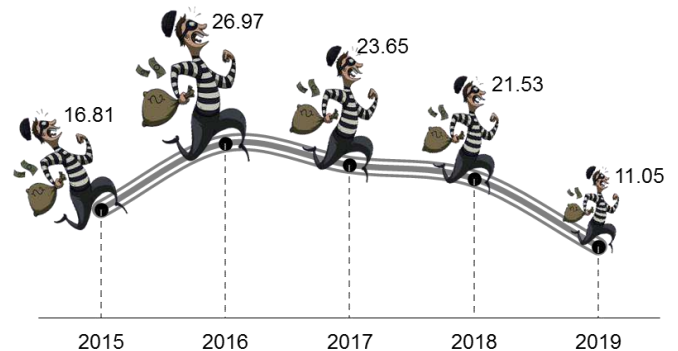
Untuk periode yang sama, rasio LDR BPR di Papua rata-rata di atas 200%, dengan kecenderungan yang terus menurun. Terakhir di tahun 2019 LDR BPR di Papua sebesar 164,35%, dengan kata lain mengalami penurunan -24,98% per tahun dari tahun 2015. Sudah sepatutnya BPR di Papua lebih ketat memberikan kredit kepada masyarakat, dan memperbesar dana pihak ketiga agar rasio LDR dapat ditekan hingga di bawah ambang batas aman 94%.

2.6. TINGKAT KRIMINALITAS

Tingkat Kriminalitas di Papua cenderung mengalami penurunan yang signifikan.

Khususnya jika diperhatikan selama periode 2016-2019, kurang lebih menurun sebesar -25,72% per tahun, sehingga di tahun 2019 angka kriminalitas menjadi 11,05 per 10.000 jiwa penduduk. Kondisi ini menandakan tingkat keamanan di Papua semakin terjamin setiap tahunnya.

Gambar 2.17. Angka Kriminalitas Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (per 10.000 penduduk)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Gambar 2.17. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Di Provinsi Papua Tahun 2016-2018 (%)



Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

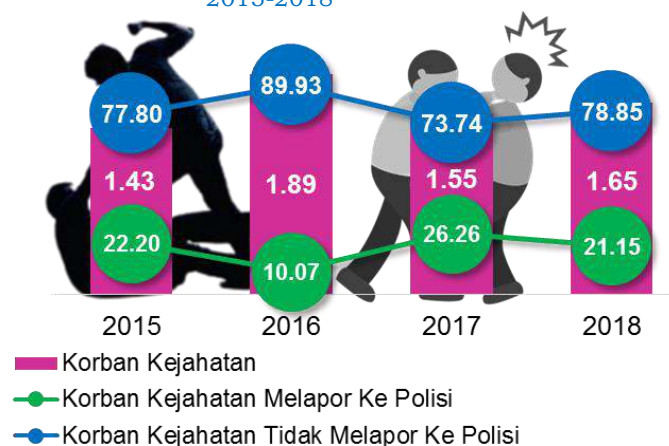
Disisi lain Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Papua terus mengalami peningkatan.

Sebagai contoh untuk tahun 2016-2018 persentase kriminalitas yang tertangani meningkat setiap tahunnya sekitar 2,57%. Dan tercatat di tahun 2018 angkanya sebesar 85,60%. Dengan kata lain dari total kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2018, kurang lebih 85,60% yang sudah ditangani oleh pihak keamanan.

Kesadaran penduduk dalam melaporkan sebagai korban kejahatan kepada pihak keamanan masih belum maksimal.

Fenomena ini tercermin dari proporsi korban kejahatan yang tidak melapor kepada polisi sangat tinggi, yaitu 80,08% per tahun dari total persentase korban kejahatan sekitar 1,63% per tahun selama periode 2015-2018. Dengan kata lain, rata-rata hanya ada 19,92% saja korban kejahatan yang melapor ke polisi.

Gambar 2.18. Persentase Korban Kejahatan, Korban Yang Melapor Dan Tidak Melapor Ke Polisi Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018



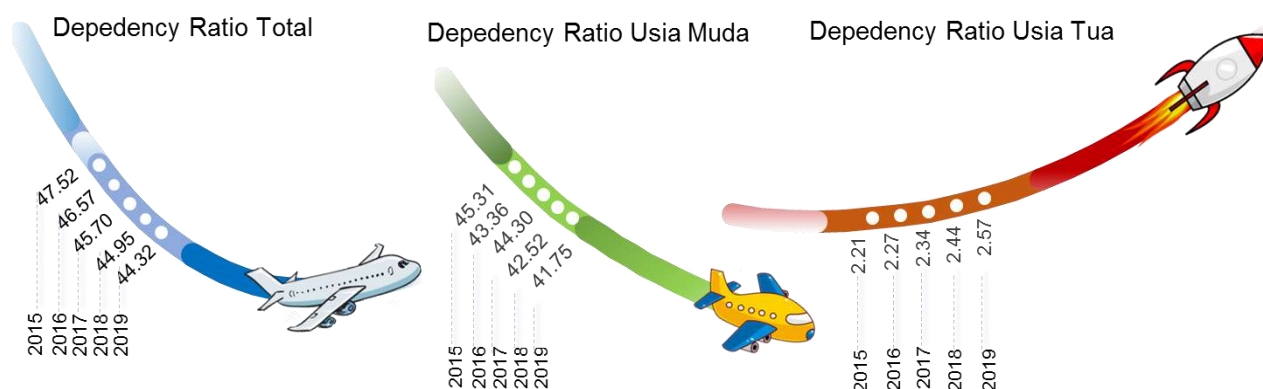
Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)



2.7. RASIO KETERGANTUNGAN

Tingkat Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio) di Papua terus mengalami penurunan. Dari angka sebesar 47,52 di tahun 2015 menjadi 44,32 per 100 penduduk usia produktif di tahun 2019. Dandiproeksikan hal ini akan terus berlangsung hingga tahun 2025-2033 dimana Papua akan memperoleh bonus demografi, yaitu kondisi terdapat keberlimpahan penduduk yang berada pada usia produktif, sehingga banyak tersedia jumlah pekerja yang dapat menciptakan surplus nilai tambah regional baik itu melalui penerimaan upah maupun pajak.

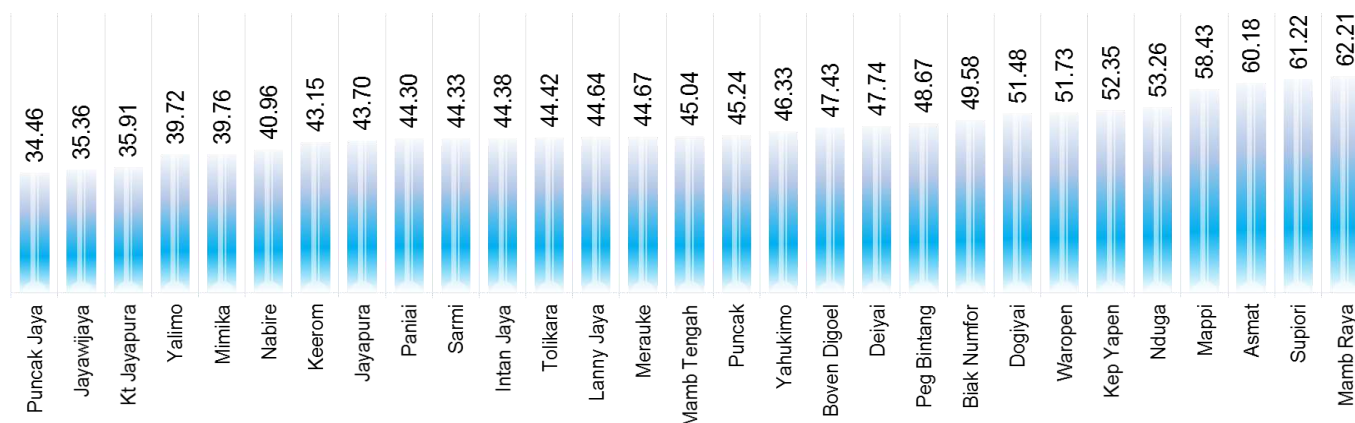
Gambar 2.19. Dependency Ratio Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (per 100 penduduk usia produktif)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

Penurunan ketergantungan penduduk di Papua lebih banyak dikontribusi berkurangnya angka ketergantungan pada penduduk usia muda. Rata-rata penurunan angka ketergantungan usia muda di Papua selama tahun 2015-2019 misalkan bisa mencapai -2,07% per tahun, sehingga pada tahun 2019 tercatat rasio ketergantungan pada usia muda sebesar 41,75 per 100 penduduk usia produktif. Sementara pada usia tua mengalami peningkatan sebesar 3,36% per tahun untuk periode yang sama, dimana pada tahun 2019 rasionya sebesar 2,67 per 100 penduduk usia produktif.

Gambar 2.20. Dependency Ratio Total Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 (per 100 penduduk usia produktif)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

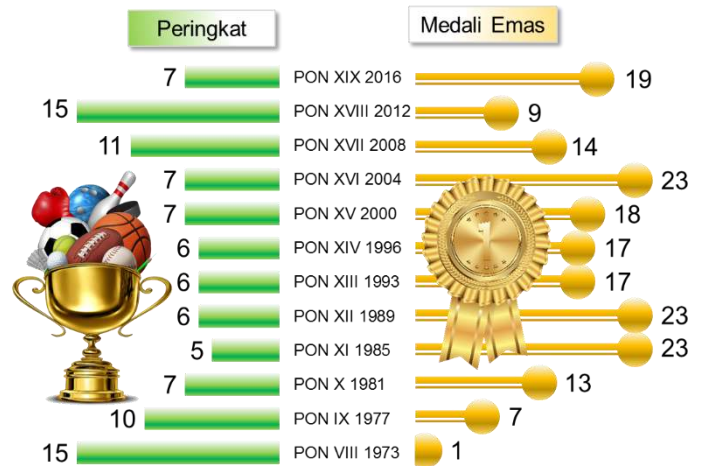
Sampai dengan tahun 2019, cukup banyak daerah di Papua yang mendapat tekanan dari penduduk usia non produktif. Delapan daerah diantaranya adalah yang paling tinggi, yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, Asmat, Mappi, Nduga, Kepulauan Yapen, Waropen dan Dogiyai, yang diindikasikan dengan rasio ketergantungan lebih dari 50, antara 51,73 – 62,21 per 100 penduduk usia produktif. Adapun yang paling rendah rasio ketergantungannya di Kabupaten Puncak Jaya, Jayawijaya, Yalimo, Mimika dan Kota Jayapura yakni dibawah 40 per 100 penduduk usia produktif.



2.8. PRESTASI PAPUA DALAM PON DAN PERSIAPAN PON XX PAPUA

Provinsi Papua mampu menunjukkan prestasinya dalam setiap PON (Pekan Olah Nasional) di Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan sempat di ukir Provinsi Papua di PON XI Tahun 1985. Kala itu Provinsi Papua mampu berada di peringkat ke-5 dengan perolehan medali emas sebanyak 23 buah. Sampai dengan PON XVI tahun 2004 Provinsi Papua selalu berada di posisi 10 besar di Indonesia. Namun, di PON XVII – XVIII prestasi Papua tidak lagi di posisi 10 besar. Kemudian di tahun 2016 pada PON XIX di Jawa Barat, kembali Provinsi Papua dapat mengoreksi peringkatnya naik ke posisi ke-7, dengan total medali emas sebanyak 19 buah.

Gambar 2.18. Prestasi Papua Dalam PON Tahun 1973-2016

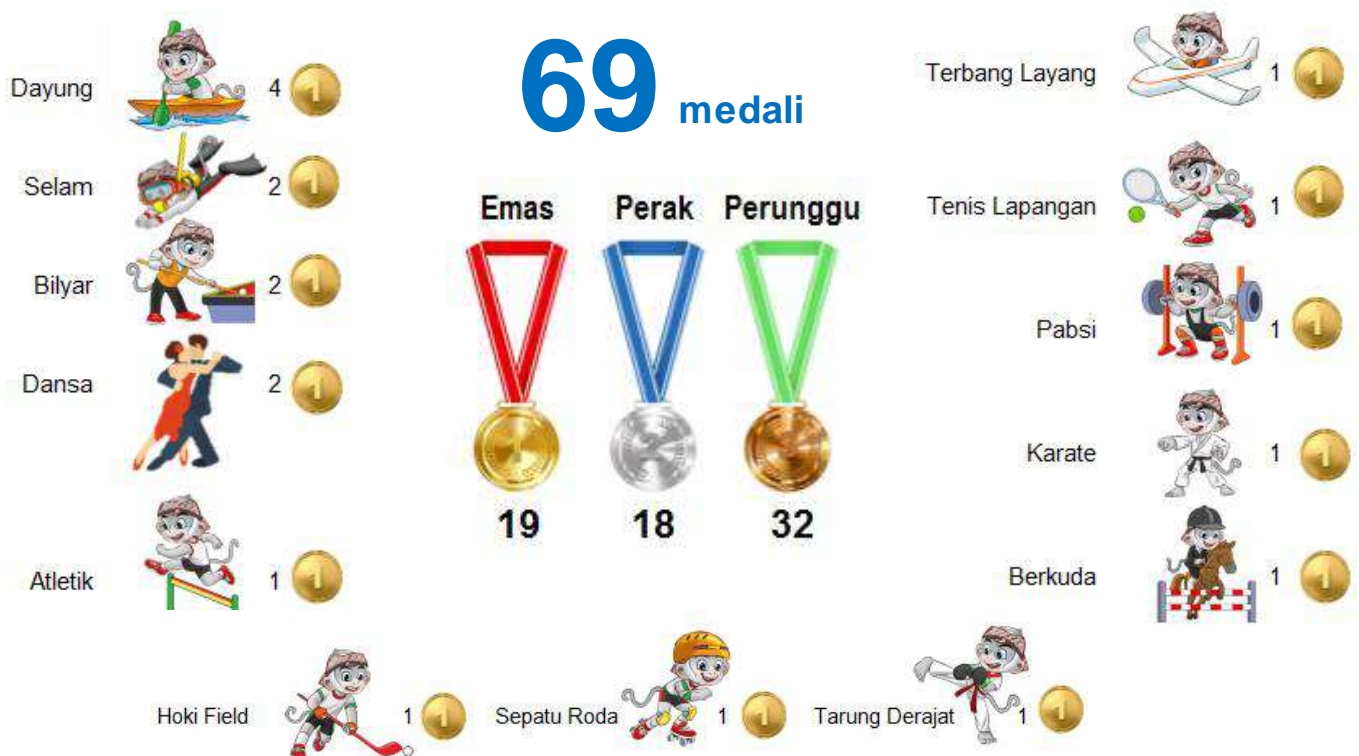


Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pada PON XIX yang diadakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 Cabang Olah Raga, dimana semuanya mampu menghasilkan medali.

Total medali yang dapat diraih sebanyak 69 medali, yang terdiri atas 19 medali emas, 18 perak dan 32 perunggu. Terdapat 13 Cabang yang menyumbangkan medali emas, yang terbanyak dari dayung yaitu 4 medali, kemudian selam, bilyard dan dansa masing-masing 2 medali emas. Sedangkan Cabang lainnya masing-masing meraih 1 medali emas.

Gambar 2.19. Perolehan Medali Provinsi Papua Pada PON XIX Tahun 2016



Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Pada tahun 2014, Provinsi Papua resmi ditetapkan sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01/10 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.

Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan PON XX tersebut, yang telah diundur menjadi tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Papua selaku tuan rumah telah melaksanakan berbagai tahapan persiapan mulai tahun 2015, guna mencapai 4 (empat) Sukses PON, yaitu Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, Sukses Pemberdayaan Ekonomi, dan Sukses Administrasi.



Terkait brand identity PON XX Papua, telah dibuat maskot, slogan dan logo yang diluncurkan tahun 2019. Maskot PON XX Papua adalah dua hewan khas Papua, yakni Kangguru Pohon yang diberi nama Kangpo, dan Burung Cendrawasih yang diberi nama Drawa. Selain itu juga ada slogan "Torang Bisa", dan logo PON XX Papua.

Gambar 2.20. Brand Identity PON XX Papua



Maskot Kangpo menggunakan rumbai pada bagian kepala dan pinggang sebagai representasi busana kebesaran asal Papua, yang dilengkapi dengan ukiran pada ikat pinggang. Kangpo juga dilengkapi dengan ikon Gunung Jayawijaya yang ditempatkan pada bagian depan mahkota.



Slogan PON XX 2020, "Torang Bisa". Kata tersebut merupakan penyemangat khas Papua yang bertujuan untuk mengobarkan semangat juang para atlet.



Maskot Drawa memiliki mahkota dan rumbai. Bagian dada juga dilengkapi dengan tali merah putih, juga warna jingga pada bagian dalam tubuhnya sebagai lambang kehangatan, persahabatan, dan cinta kasih. Warna kuning mewakili warna cendrawasih yang melambangkan semangat dan kegembiraan. Jumlah sayap, ekor, dan jari pada kedua kaki Drawa mencirikan jadwal pembukaan PON XX.



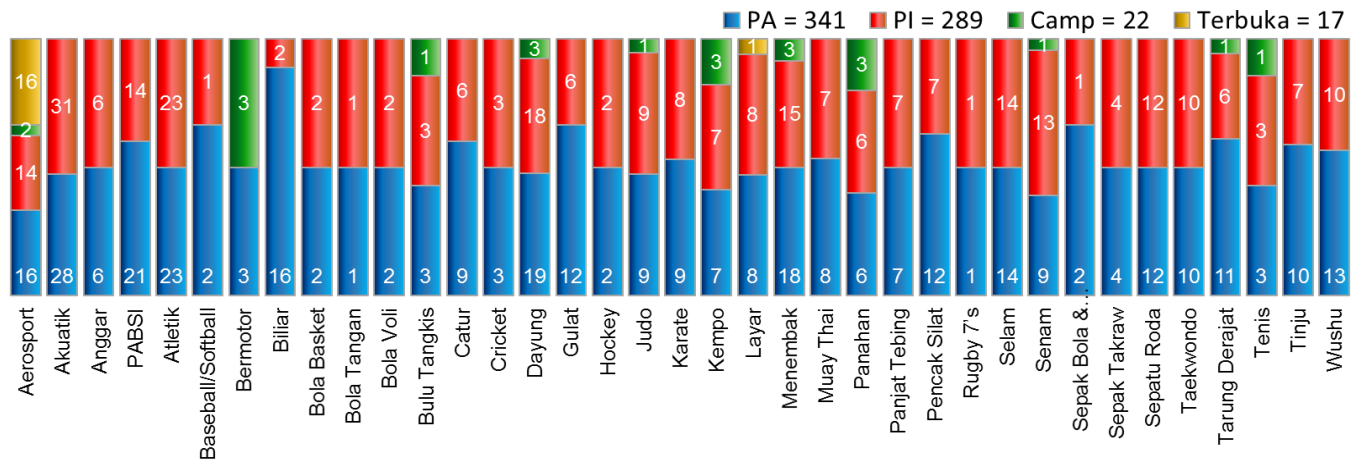
Logo PON XX adalah gambaran Stadion Papua Bangkit, simbol kemegahan di bidang olahraga rakyat Papua. Stadion Papua Bangkit nyaris menyamai Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, menjadi ikon olahraga di Papua yang bertaraf internasional dengan standar FIFA.

Sumber : PB PON XX Provinsi Papua (2020)



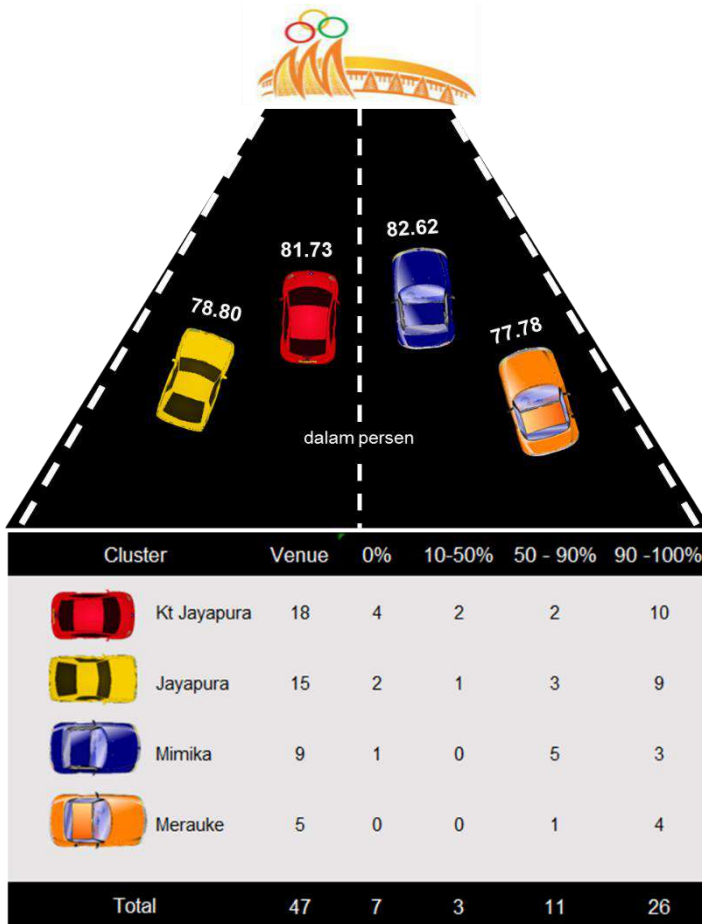
KONI telah menetapkan jumlah cabang olah raga, disiplin cabang olah raga dan nomor pertandingan pada PON XX Papua. Berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan/Perlombaan, dan Kuota Atlet Setiap Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua, diputuskan mengenai penyelenggaraan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan dalam PON XX Papua.

Gambar 2.21. Cabang Olah Raga PON XX Papua



Sumber : PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Gambar 2.22. Penyelesaian Pembangunan Arena PON XX Papua Menurut Klaster



Sumber : PB PON XX Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Pemerintah Provinsi Papua membangun 47 venue untuk melaksanakan pertandingan setiap Cabor yang telah ditetapkan. Sampai saat ini sudah sekitar 80,47% venue yang terbangun untuk digunakan, yang tersebar pada 4 (empat) klaster yaitu :

- Kota Jayapura ada 18 venue dimana sekitar 81,73% telah selesai dibangun ;
- Kabupaten Jayapura ada 15 venue yang telah selesai dibangun 78,50%.
- Kabupaten Mimika sebanyak 9 venue dengan tingkat kemajuannya 82,62% terbangun;
- Kabupaten Merauke sebanyak 5 venue dengan penyelesaiannya 77,78%.



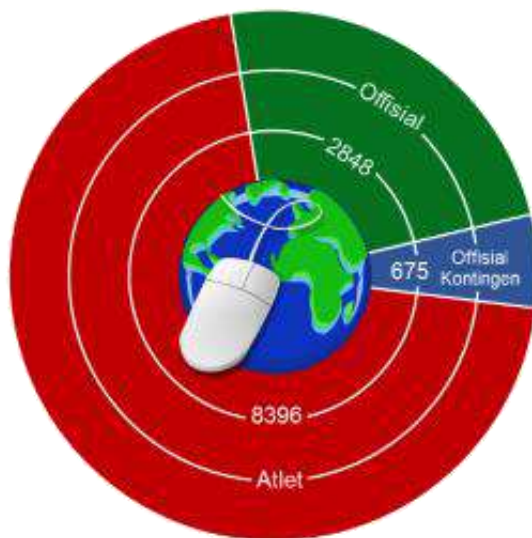
Sesuai dengan pembangunan *venue* yang terklaster, penyelenggaraan Cabor PON XX Papua juga tersebar pada masing-masing klaster tersebut. Dalam hal ini Ke-37 cabang olahraga yang telah ditetapkan akan dipertandingkan di Klaster Kota Jayapura sebanyak 17 cabor, Klaster Kabupaten Jayapura sebanyak 16 cabor, Klaster Kabupaten Mimika sebanyak 11 cabor, dan Klaster Kabupaten Merauke sebanyak 6 cabor. Berikut ini rincian Cabor di masing-masing klaster.

Gambar 2.23. Penyebaran Cabor PON XX Papua Menurut Klaster

Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Kab. Mimika	Kab. Merauke
Rugby 7's	Selam Kolam	Tarung Derajat	Sepakbola Putri
Tinju	Silat	Judo	Anggar
Karate	Kempo	Bola Tangan	Wushu
Bulutangkis	Sepakbola Penyisihan Putra	Futsal	Gulat
Tenis	Cricket	Panjat Tebing	Catur
Sepakbola Putra	Menembak	Billiard	Bermotor
Sepatu Roda	Muaythai	Bola Basket	
Sepak Takraw	Senam	Atletik	
Selam Laut	Baseball & Softball	Terjun Payung	
Tae Kwon Do	Hoki	Terbang Layang	
Layar	Polo Air	Aeromodeling	
Dayung	Renang Artistik		
Bola Voli (Indoor & Pasir)	Renang		
Panahan	Loncat Indah		
Baseball & Softball	Paralayang		
Angkat Besi/Berat/Binaraga	Gantole		
Renang Perairan Terbuka			

Sumber : PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Gambar 2.24. Jumlah Kontingen PON XX Papua Yang Mendaftar Pada Tahap Pertama 2020



Sumber : PB PON XX Provinsi Papua (2020)

Dalam rangka memudahkan peserta dan panitia, pendaftaran peserta PON XX Papua menggunakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terintegrasi dengan bidang lainnya. Dimana pada tahap pertama (*Entry by Sport and by Number*) tanggal 20 Februari s/d 19 April 2020 sudah terdaftar 11.919 peserta, terdiri atas 8.396 atlet, 2.848 official dan 675 official kontingen. Dari daerah, kontingen yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.528 orang (12,82%), Papua 1.384 orang (11,61%) dan Jawa Barat 1.241 orang (10,41%). Sedangkan untuk kontingen dengan jumlah sedikit adalah Provinsi Maluku 21 orang (0,18%), Kalimantan Utara 48 orang (0,40%) dan Sulawesi Utara 50



TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021-2022

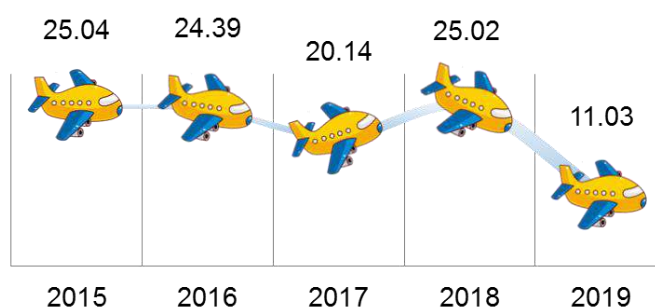
Laporan Infografis Hasil Pembangunan
Provinsi Papua Tahun 2020



4.1. PERDAGANGAN ANTARNEGARA

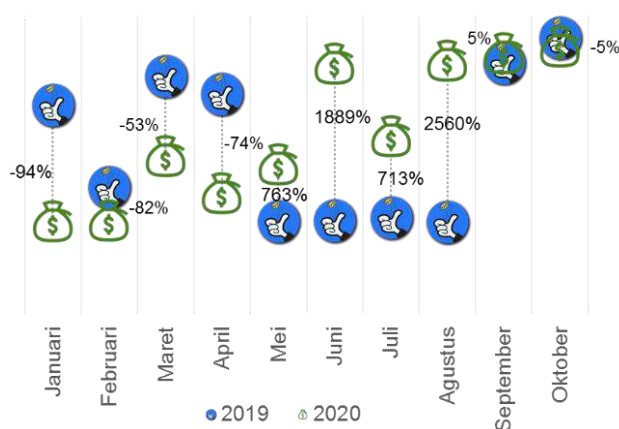
Perekonomian Papua sangat terbuka dengan negara lain. Kondisi ini digambarkan dengan tingginya rasio ekspor dan impor luar negeri terhadap PDRB yang lebih dari 20% per tahun, terutama pada tahun 2015-2018.

Gambar 4.1. Derajat Keterbukaan Ekonomi Luar Negeri Di Provinsi Papua 2015-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

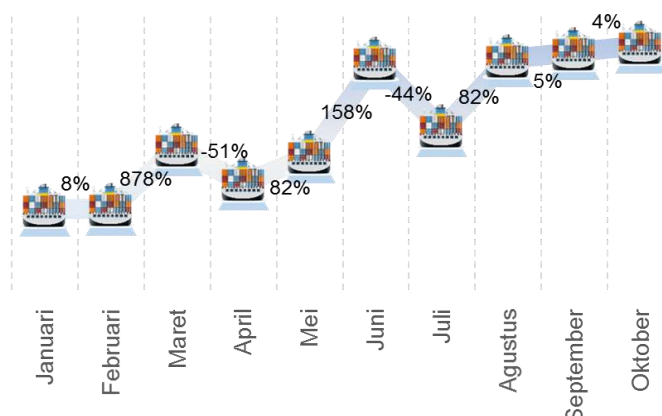
Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekspor Non Migas Bulanan *y.o.y* Provinsi Papua Tahun 2019-2020 (%)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

Nilai ekspor non migas bulanan *m.o.m* Provinsi Papua selama tahun 2020 meningkat sangat signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu sebesar 878% dibandingkan Januari 2020, serta di bulan Juni 2020 sebesar 158%. Rata-rata selama periode Januari-Oktober 2020 nilai ekspor non migas Papua meningkat sekitar 124% per bulan.

Gambar 4.3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas Bulanan *m.o.m* Provinsi Papua Tahun 2020 (%)

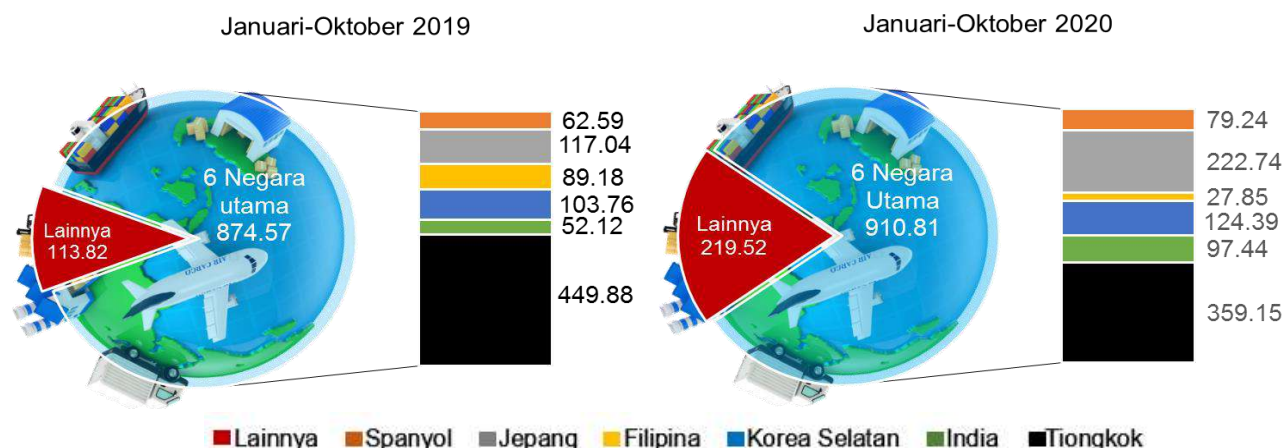


Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)



Terdapat 6 negara utama yang menjadi pangsa terbesar ekspor non migas Papua. Ke-6 negara yang dimaksud adalah Tiongkok, India, Korea Selatan, Filipina, Jepang dan Spanyol. Rata-rata total kontribusi negara-negara tersebut sebesar US\$ 1059,36 juta (84,53%) per tahun selama periode 2019-2020. Dipastikan dinamika ekonomi ke-6 negara ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan ekonomi wilayah Papua.

Gambar 4.3. Komposisi Ekspor Menurut Negara Tujuan Di Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (juta US\$)



4.2. PERDAGANGAN ANTARDAERAH

Perkembangan neraca perdagangan antardaerah Provinsi Papua selalu mengalami defisit yang cenderung terus meningkat. Fenomena ini tercermin padatahun 2019 dimana defisitnya bertambah sekitar Rp. -1,469,425 juta dibandingkan tahun 2018. Tercatat di tahun 2019 nilai pembelian meningkat 67,63%, sedangkan nilai penjualan menurun sebesar -46,42%.

Gambar 4.4. Perkembangan Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2018-2019

Komponen Perdagangan Antarwilayah	2018		2019		Perubahan 2018-2019	
	Nilai (rp juta)	Volume (kg)	Nilai (rp juta)	Volume (kg)	Nilai (%)	Volume (%)
Pembelian	1,334,778	27,988,648	2,237,434	160,183,399	67.63	472.32
Penjualan	412,396	6,670,688	220,966	3,629,545	-46.42	-45.59
Neraca Perdagangan	-922,382	-21,317,960	-2,016,468	-156,553,854		

Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

Gambar 4.5. Struktur Komoditi Perdagangan Antaradaerah Provinsi Papua Tahun 2019 (%)

Komoditi	Pembelian	Penjualan
Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	15.12	-
Industri kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih	26.48	-
Industri alat angkutan lainnya	17.12	-
Kelompok lainnya	41.28	-
Pertambangan bijih, logam mulia	-	0.12
Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, Bambu	-	93.31
Pengusahaan hutan	-	6.57
Total	100.00	100.00

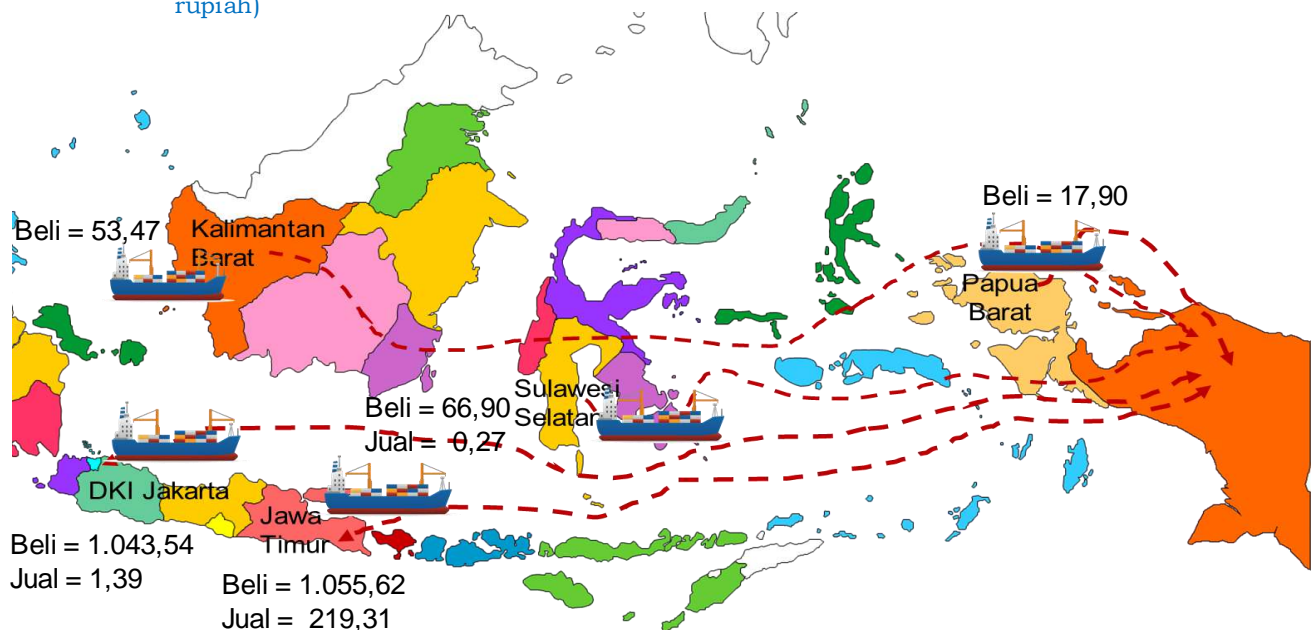
Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

Hasil industri kendaraan bermotor dan industri pengolahan kayu menguasai pangsa perdagangan antardaerah Papua selama ini. Untuk tahun 2019 misalkan, kontribusi industri kendaraan bermotor sekitar 26,48% dalam struktur pembelian antardaerah Papua, sedangkan industri pengolahan kayu menguasai 93,31% komposisi penjualan antardaerah Papua.



Terdapat 5 provinsi asal pembelian dan tujuan pembelian yang paling besar dalam struktur perdagangan antardaerah Papua. Terbesar adalah Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, ketiganya tercatat di tahun 2019 melakukan transaksi (pembelian dan penjualan) dengan Papua senilai Rp. 2.379.777 juta.

Gambar 4.6. Lima Provinsi Asal Pembelian dan Tujuan Penjualan Terbesar Provinsi Papua Tahun 2019 (milyar rupiah)



Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

4.3. CAPITAL INFLOW

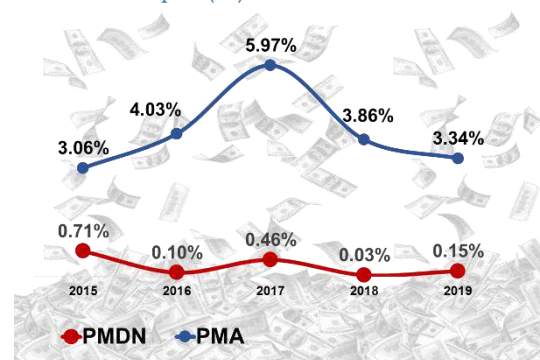
Nilai investasi di Papua yang difasilitasi oleh PMDN cenderung mengalami kontraksi, sementara melalui PMA terlihat cukup ekspansif. Seperti yang tercermin pada tahun 2015-2019, rata-rata nilai PMDN Provinsi Papua mengalami kontraksi sekitar -18,32% per tahun sehingga pada tahun 2019 tercatat nilai PMDN menjadi Rp. 567,79 milyar. Disisi lain, nilai PMA relatif ekspansif sekitar 1,20% per tahun, dengan nilai PMA sebesar US\$941 juta di tahun 2019. Peran Provinsi Papua dalam pangsa PMDN di Indonesia sangat rendah, hanya 0,29% per tahun selama periode 2015-2019. Sedangkan pada struktur PMA terlihat cukup besar sekitar 4,05% per tahun.

Gambar 4.5. Nilai Investasi Dan Kontribusi Provinsi Papua Dalam Komposisi Penanaman Modal Indonesia Tahun 2015-2019

Nilai Penanaman Modal Papua Dan Indonesia

Investasi/Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
PMDN (milyar rupiah)					
Papua	1,275.20	220.50	1,217.90	104.60	567.70
Indonesia	179,465.90	216,230.80	262,350.50	328,604.90	386,498.40
PMA (juta US\$)					
Papua	897.00	1,168.40	1,924.10	1,132.30	941.00
Indonesia	29,275.90	28,964.10	32,239.80	29,307.90	28,208.80

Kontribusi Papua (%)

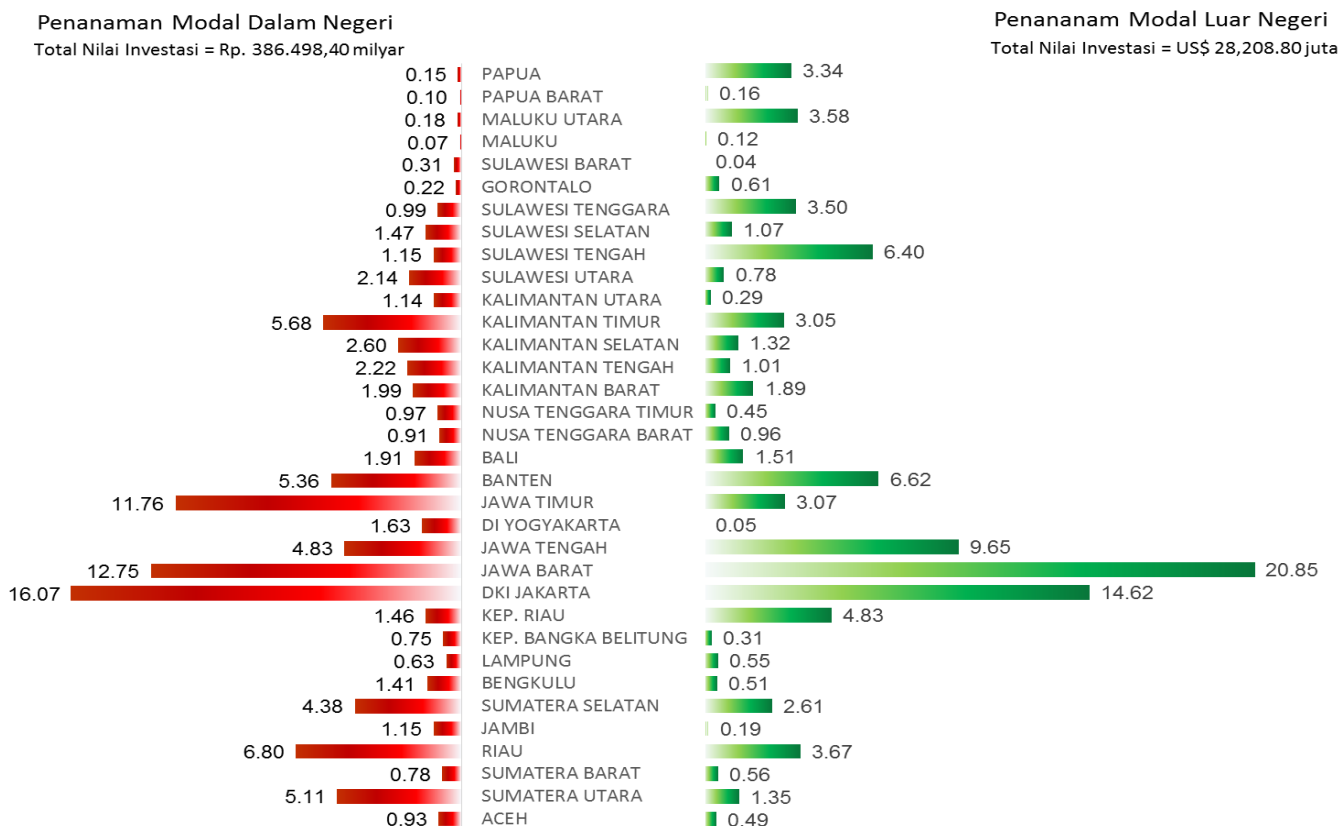


Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)



Investor dalam negeri yang difasilitasi dengan PMDN tampak belum banyak yang berminat untuk merealisasikan penanaman modalnya di Provinsi Papua. Fakta ini terlihat jelas dalam struktur spasial penanaman modal di Indonesia tahun 2019, dimana realisasi kontribusi Provinsi Papua hanya 0,15% (paling rendah). Beda halnya dengan PMA, andil Papua dapat dikatakan cukup tinggi, dan masuk dalam 10 besar di Indonesia, dengan kontribusinya mencapai 3,34% yang relatif lebih baik dibandingkan Jawa Timur, Kalimantan Timur Dan Sumatera Selatan.

Gambar 4.6. Perbandingan Andil Provinsi Papua Dengan Daerah Lainnya Dalam Struktur Penanaman Modal Indonesia Tahun 2019 (%)



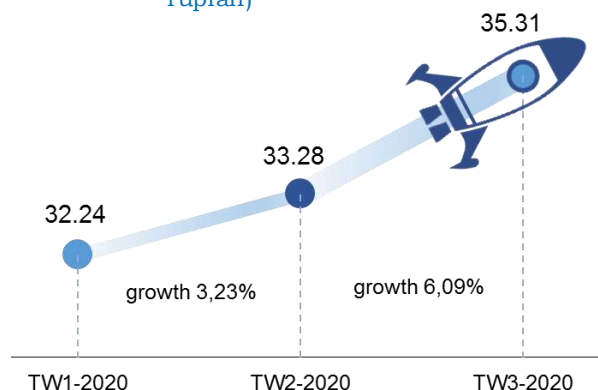
Sumber : BPS RI, 2020 (data diolah)

4.4. INDIKATOR MAKROEKONOMI PAPUA 2020

Jika menyertakan sektor tambang, PDRB Provinsi Papua tampak mengalami pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan PDRB dari Triwulan I s/d Triwulan III mencapai 4,66% per triwulan (q.o.q), dengan kenaikan tertinggi di Triwulan III sebesar 6,09% sehingga nilai PDRB Papua bisa mencapai Rp. 35,31 triliun.

Red : PDRB tanpa tambang mengalami kontraksi rata-rata sekitar -0,24% per triwulan (q.o.q)

Gambar 4.7. Perkembangan PDRB Triwulanan Provinsi Papua Dengan Sektor Tambang Tahun 2020 (triliun rupiah)

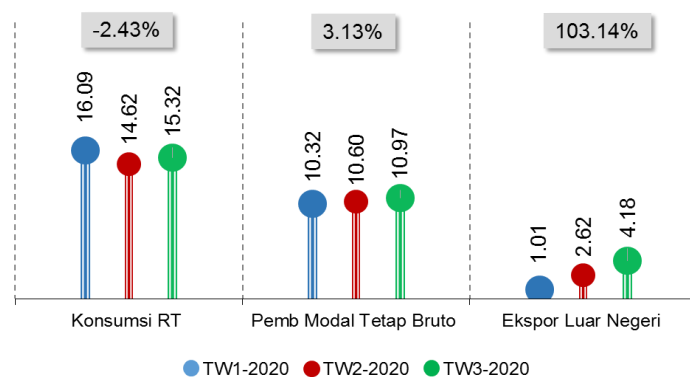


Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)



Berdasarkan PDRB pengeluaran dari Triwulan I s/d III hanya komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga yang mengalami kontraksi. Indikatornya terlihat dari rata-rata pertumbuhannya per triwulan yang turun sebesar -2,43%. Sedangkan komponen Pertambahan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Luar Negeri tampak jelas tumbuh positif, dimana yang paling ekspansif adalah komponen ekspor mencapai 103,14% per triwulan (*q.o.q*) yang didominasi oleh ekspor tambang bijih tembaga dan emas.

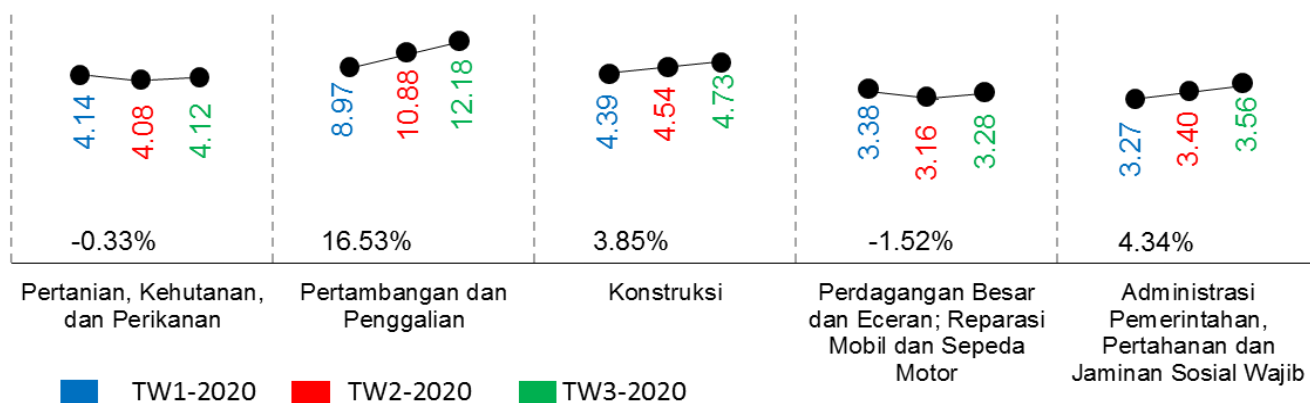
Gambar 4.8. Tiga Komponen Pengeluaran Terbesar Pembentuk PDRB Provinsi Papua Tahun 2020 (triliun rupiah)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

Terdapat 5 sektor besar yang menjadi pondasi ekonomi Papua selama tahun 2020, dimana 2 diantaranya mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor yang dimaksud adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami penurunan sekitar -0,33% per triwulan (*q.o.q*), serta sektor perdagangan yang menurun rata-rata -1,52% per triwulan (*q.o.q*). Sementara 3 sektor yang lain semua mengalami pertumbuhan positif, yang paling tinggi sektor pertambangan (16,53%), kemudian sektor pemerintahan (4,34%), dan sektor konstruksi (3,85%).

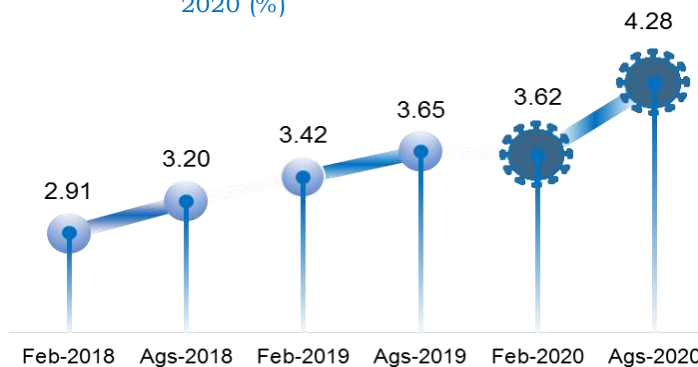
Gambar 4.9. Lima Sektor Terbesar Dalam Komposisi PDRB Provinsi Papua Tahun 2020 (triliun rupiah)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Papua pada tahun 2020 tercatat tinggi. Sampai dengan bulan Agustus 2020 angkanya mencapai 4,28% atau naik sebesar 0,66% dari bulan Februari 2020, sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Menurut BRS Tenaga Kerja (BPS Papua, 2020), pada Agustus 2020, ada sekitar 229.617 orang atau sebanyak 9,38% dari total penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Disini sekitar 2.529 orang menjadi pengangguran, 1.935 orang menjadi bukan angkatan kerja, 8.559 orang sementara tidak bekerja, dan 216.594 orang mengalami pengurangan jam kerja.

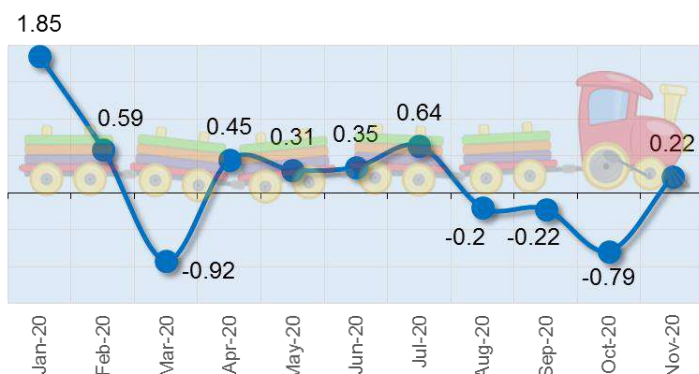
Gambar 4.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Papua Periode Februari 2018 – Agustus 2020 (%)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)



Gambar 4.11. Tingkat Inflasi Bulanan Provinsi Papua Tahun 2020 (%)



Sumber : BPS Papua, 2020 (data diolah)

Efek imported inflation di Papua selama tahun 2020 kurang terlihat signifikan.

Hal ini karena sepanjang bulan Januari sampai dengan November 2020 inflasi bulanan di Provinsi Papua selalu rendah dibawah 1% dengan rata-rata 0,21% per bulan (*m.o.m*). Bahkan untuk 4 bulan tertentu sempat mengalami deflasi, yang terbesar pada bulan Maret (-0,92%) dan Oktober (-0,79%). Sehingga dimungkinan tingkat inflasi Papua di tahun 2020 akan bergerak diantara 2,5 – 3,5 % (*y.o.y*).

4.5. FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kondisi perekonomian Papua yang sangat terbuka, dipastikan secara eksternal sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang terjadi pada setiap negara mitra dagang. Dalam hal ini, berdasarkan kecenderungan ekspor luar negeri selama tahun 2020 terdapat 5 negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Papua yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik dimasa mendatang, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Filipina dan Korea Selatan. Berikut ini disampaikan perkiraan kondisi perekonomian dari negara-negara mitra dagang tersebut untuk 1-2 tahun mendatang.



REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Di tahun 2020, di mana negara-negara di dunia banyak yang mengalami resesi dengan pertumbuhan negatif, namun di RRT terjadi pemulihan ekonomi dengan cepat dan diperkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 1,9%. Dalam proyeksi tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi RRT mejel hingga 6% pada 2021, namun turun menjadi 2,6% di tahun 2022 (IMF, 2020).



JEPANG. Tahun 2020, Pertumbuhan Jepang diproyeksi kan moderat menjadi 0,5%, dan untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi akan meningkat menjadi 1,5% (IMF, 2020).



INDIA. Dalam Prospek Ekonomi Dunia tahunannya, IMF (2020) telah menurunkan pertumbuhan India untuk tahun fiskal 2020 menjadi minus 10,3%. IMF menyebut, ekonomi India kemungkinan akan bangkit kembali dengan tingkat pertumbuhan 8,8% di tahun 2021.



FILIPINA. Negara Filipina juga terlihat mengalami resesi akibat dampak covid-19. Pemerintah Filipina sendiri memprediksi pertumbuhannya akan merosot hingga -5,5% sepanjang tahun 2020, yang mana angka ini lebih rendah dari yang diprediksi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar 2,0% sampai 3,4%. Tahun 2021 perekonomian Filipina diprediksi akan bisa mencapai 7,6% di tahun 2021 dan 6,4% di tahun 2022 (IMF, 2020).



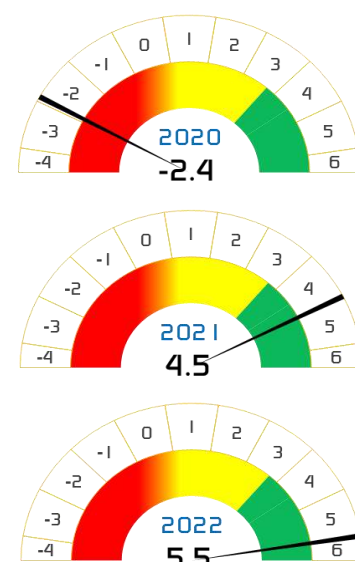
KOREA SELATAN. OECD (2020) dalam laporannya memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun 2020 berkontraksi menjadi -1,0% sedangkan di tahun 2021 akan meningkat kinerja perekonomian Korea Selatan menjadi 3,0%.



Selain secara eksternal, perekonomian domestik Papua juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal kondisi ekonomi nasional, baik itu melalui perdagangan antardaerah maupun aliran investasi PMDN. Oleh karena itu dinamika perekonomian nasional di masa mendatang dipastikan akan mempengaruhi prospek perekonomian Papua untuk 1-2 tahun kedepan. Terkait dengan argumentasi tersebut, berikut ini dipaparkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021, dan prospeknya di tahun 2021 dan 2022.

- ☺ **MENKEU RI.** Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,4 persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi awal sebesar -1,1 persen dan +0,2 persen. Penyebabnya, kasus Covid-19 kembali melonjak, sehingga masyarakat enggan beraktivitas (inews.id, 2020)
- ☺ **RAPBN 2021.** Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Perkiraan itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang telah disampaikan oleh presiden kepada DPR RI.
- ☺ **BANK DUNIA.** Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% pada 2021 atau perlahan-lahan pulih setelah diperkirakan tumbuhnya 0% pada 2020, dan melesat hingga 6% pada 2022 (databoks.katadata.co.id, 2020).
- ☺ **BKF KEMENKEU RI.** Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu RI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 berada dalam rentang 3,0 - 4,4%, dan di tahun 2022 sebesar 5,1% (BKF Kemenkeu RI, 2020).

Gambar 4.12. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020, 2021 dan 2022 (%)



Sumber : Kemenkeu RI dan World Bank, 2020 (data diolah)

4.6. PROYEKSI EKONOMI PAPUA 2021 DAN 2022

Secara makro, proyeksi ekonomi Papua dapat ditinjau dari sisi *aggregate demand* dan *aggregate supply*. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dipaparkan beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi ekonomi Papua untuk tahun 2021 dan 2022.

- ➔ **Dari sisi *aggregate demand*, perekonomian Papua masih akan ditopang oleh ekspor komoditas non migas yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian.** Di tahun 2020, kinerja sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Papua relatif tidak terpengaruh oleh Pandemi Covid-19, disaat sektor lainnya mengalami kontraksi. Diperkirakan dengan adanya pemulihan ekonomi di negara tujuan (RRT, India, Filipina, Jepang dan Korea Selatan) maka ekspor Papua masih akan mengalami pertumbuhan positif walaupun lambat. Kinerja perekonomian Papua tahun 2021 dan 2020 akan berpotensi positif dikarenakan meningkatnya kinerja pertambangan dengan dibukanya pertambangan bawah tanah sehingga meningkatkan produktivitas tambang dengan produksi tembaga dan emas yang berkualitas dibanding dengan tambang terbuka.
- ➔ **Selain ekspor, peranan konsumsi rumah tangga juga sangat dominan pada pertumbuhan ekonomi Papua.** Sehingga dengan terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi di akhir tahun 2020 akan semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga dan semakin membaiknya iklim usaha di Papua di tahun 2021, yang berlanjut ke tahun 2022 lebih normal. Faktor perdagangan antardaerah yang semakin membaik dan bertambah pulih setelah di terpa Pandemi Covid-19 di Indonesia turut mengakselerasi peningkatan konsumsi rumah tangga di Papua pada tahun 2021 dan 2022.



Pelaksanaan PON XX Papua akan memberi efek multiplier yang sangat besar bagi perekonomian domestik baik itu peningkatan pada *aggregate demand* maupun *supply*.

Moment PON XX tahun 2021 tersebut dapat mendorong aktivitas produksi di Papua yang telah melambat di tahun sebelumnya, khususnya pada sektor transportasi, akomodasi dan penyediaan makan minum, pariwisata, pertanian, industri, konstruksi, dan beberapa sektor utilitas lainnya seperti produksi air dan listrik. Kondisi ini diperkirakan akan berjaan sampai akhir tahun 2021, yang kemudian memberi dampak simultan dan akselerasi pertumbuhan di tahun 2022. Selain itu, dari sisi *aggregate demand* juga dapat mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah yang akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua baik itu di tahun 2021 maupun 2022 melalui belanja barang dan jasa, serta modal terkait dengan penyelenggaraan PON XX Papua.

Berdasarkan asumsi-asumsi makroekonomi di atas, serta mengacu pada kerangka logis adanya dampak simultan antar variabel ekonomi, maka berikut ini dapat disampaikan hasil proyeksi perekonomian Papua di tahun 2021 dan 2022, terutama untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB dengan tambang dan tanpa tambang), inflasi, tingkat pengangguran, rasio penduduk bekerja dan ketimpangan pendapatan.

Gambar 4.13. Tabel Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Papua Tahun 2021 dan 2022 (%)

Indikator Ekonomi	2019	Perkiraan	Proyeksi		RPJMD Papua 2019-2023	
		2020	2021	2022	2021	2022
Pertumbuhan PDRB DT	-15.72	4.40	4.74	5.64	5.91	6.26
Pertumbuhan PDRB TT	5.03	-0.65	3.12	4.05	6.53	6.96
Laju Inflasi	2.34	3.28	3.64	2.86	2.34	2.3
Gini Ratio	0.36	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39
Rasio penduduk bekerja	96.35	95.72	96.15	96.40	97.68	97.84
TPT	3.65	4.28	3.85	3.60	2.32	2.16

Sumber : data diolah (2020)

